



**BADAN POM**



# 2018 Laporan Kinerja Intansi Pemerintah

**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di YOGYAKARTA**

Jalan Tompeyan I , Tegalrejo , Yogyakarta 552250

Telp. (0274) 561038, Telp./Fax (0274) 519502 / ULPK Telp./Fax (0274)552250

e-mail : [bpom\\_yogyakarta@pom.go.id](mailto:bpom_yogyakarta@pom.go.id) / [bbpomjg@yahoo.co.id](mailto:bbpomjg@yahoo.co.id) ; Website : [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)

## KATA PENGANTAR



Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan LAKIP tahun 2018 didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP BBPOM di Yogyakarta tahun 2018 merupakan sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi yang disusun dalam bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan, serta sebagai dasar untuk upaya peningkatan kinerja di masa mendatang. Tahun 2018 adalah tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis BBPOM di Yogyakarta Tahun 2015-2019, yang telah dilakukan revisi menyesuaikan SOTK baru.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja *input*, *output*, dan *outcome*, yang telah ditetapkan dan direalisasikan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan BBPOM di Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2018. Akhir kata, kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban BBPOM di Yogyakarta dan dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan kinerja BBPOM di Yogyakarta dan Badan POM di tahun berikutnya.

Yogyakarta, 13 Februari 2019

BBPOM di Yogyakarta

KEPALA



Dra. Kustyawati, Apt., M.Kes. Epid.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
Highlight.....	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum Organisasi .....	1
B. Struktur Organisasi.....	11
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	15
A. Rencana Strategis.....	15
B. Perencanaan Kinerja Tahunan .....	18
C. Kriteria Pencapaian Indikator .....	23
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	25
A.1. PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN 1 .....	27
A.2. PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN 2 .....	40
A.3. PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN 3 .....	43
A.4. PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN 4 .....	48
A.5. PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN 5 .....	59
A.6. PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN 6 .....	60
B. REALISASI ANGGARAN .....	65
C. ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN.....	68
PENUTUP .....	71
A. KESIMPULAN.....	71
B. SARAN .....	72
LAMPIRAN .....	74
Daftar Lampiran.....	100
Daftar Gambar.....	101
Daftar Tabel.....	102

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Yogyakarta merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja kepada publik sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan melalui Rencana strategis tahun 2015-2019 dan juga untuk evaluasi atas pencapaian kinerja dan perbaikan dimasa mendatang.

Rencana Strategis BBPOM di Yogyakarta tahun 2015-2019 telah mengalami revisi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta No. HK.01.02.95.09.18.8544, pada 14 September 2018. Revisi ini dilakukan karena perubahan struktur organisasi tata kerja Badan POM dan untuk mempermudah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian target dengan sistem movev terpadu antara movev keuangan dan movev Bappenas dengan Kementrian/Lembaga.

Pada revisi Renstra BBPOM di Yogyakarta 2015-2019, telah ditetapkan 6 sasaran kegiatan yaitu:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan
3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman
4. Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko
5. Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan
6. Terwujudnya RB sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019

Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan 15 indikator kegiatan yang merupakan indikator kinerja utama (IKU).

Pada pencapaian tahun 2018, 5 (lima) sasaran dari 6 sasaran kegiatan yang ditetapkan memberikan hasil memuaskan (>100%), yaitu pada sasaran kegiatan pertama “Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu” sebesar 101,07%, sasaran kegiatan kedua “Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan” sebesar 119,41%, sasaran kegiatan ketiga “Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman” sebesar 108,07%, sasaran kegiatan keempat “Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko” sebesar 105,89%, dan sasaran kegiatan kelima “Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan” sebesar 107,00%, sedangkan sasaran kinerja keenam “Terwujudnya RB sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019” tercapai dengan kriteria Cukup (94,33%).

Adapun rata-rata pencapaian 15 (lima belas) indikator kinerja utama (IKU) adalah 104,40%, dengan pencapaian terendah sebesar 94,33% yaitu pada indikator nilai AKIP BBPOM di Yogyakarta, dan pencapaian tertinggi yaitu 121,31% pada indikator persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan.

Pada tahun 2018 Balai Besar POM di Yogyakarta memperoleh anggaran sebesar Rp. 41.579.495.000 (Empat puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan realisasi anggaran yang dibelanjakan sebesar Rp. 39.288.045.351 (Tiga puluh sembilan milyar dua ratus delapan puluh delapan juta empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah), atau persentase serapan anggaran sebesar 94,49%.

Pada analisis efisiensi anggaran per sasaran kegiatan secara umum dapat dilaksanakan secara efisien, dengan tingkat efisiensi (TE) berkisar antara 0,0121 – 0,2547. Namun terdapat kegiatan yang tidak dapat terlaksana secara efisien yaitu pada sasaran kegiatan 4 yaitu menguatnya penegakan hukum dibidang obat dan makanan dengan TE -0,2982.

Secara keseluruhan Kinerja Balai Besar POM di Yogyakarta pada tahun 2018 telah memenuhi harapan, namun masih perlu dilakukan perbaikan secara terus menerus untuk meningkatkan kinerja ditahun mendatang, sehingga dapat tercipta manajemen kinerja pemerintah yang berorientasi pada hasil, lebih produktif, efektif dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.



# Highlight

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, BBPOM di Yogyakarta melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan bersungguh-sungguh demi mewujudkan visi dan misi organisasi. Hal ini dibuktikan dengan perolehan prestasi dan penghargaan selama tahun 2018 di tingkat provinsi, nasional maupun internasional, yaitu :

1. BBPOM di Yogyakarta mendapatkan penghargaan sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Sangat Baik” dari Kemenpan RB.
2. Laboratorium Baku Pembanding mendapatkan hasil memuaskan (*inlier*) dalam uji profisiensi “Penetapan kadar bahan baku Simetidin secara Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT)” tingkat internasional yang diselenggarakan oleh Bureau of Drug and Narcotic, Departement of Medical Science, Thailand
3. Laboratorium Pengujian produk Terapetik mendapatkan hasil memuaskan (*inlier*) dalam uji profisiensi “Disolusi Piroksikam secara Spektrofotometri” tingkat internasional yang diselenggarakan oleh Bureau of Drug and Narcotic, Departement of Medical Science Thailand
4. Laboratorium Pengujian Pangan mendapatkan hasil memuaskan (*inlier*) dalam uji profisiensi “Penetapan Kadar etanol minuman Anggur putih secara Kromatografi Gas (GC) tahap 2 dan 3 tingkat internasional yang diselenggarakan oleh APEC Wine Ring Test.
5. Desa Potorono, kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul yang merupakan binaan BBPOM di Yogyakarta mendapatkan juara I lomba Desa Pangan Aman tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Badan POM.
6. Juara III Stand Pameran dalam rangka peringatan Sekaten, yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Propinsi DIY.
7. Juara Harapan I Stand Pameran dalam kegiatan Pameran pembangunan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Propinsi DIY



# BAB I

# PENDAHULUAN



# BAB I. PENDAHULUAN

## A. Gambaran Umum Organisasi

Balai Besar POM di Yogyakarta adalah Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pada tahun 2018 sesuai Keputusan Kepala Badan POM No. 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, terdapat perubahan dalam struktur organisasi di lingkungan Badan POM, BBPOM/BPOM dan Kantor BPOM di Kabupaten/Kota di beberapa wilayah kerja BBPOM/BPOM di seluruh Indonesia.

BBPOM di Yogyakarta sebagai UPT BPOM mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

### TUGAS POKOK

Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### FUNGSI

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/ fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/ fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/ atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan

8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan POM.

### **Aspek Strategis Organisasi**

Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai peran penting dalam mendukung kemajuan Bangsa Indonesia, yang secara mandatori mendapatkan tugas dalam pengawasan Obat dan Makanan. Pengawasan Obat dan Makanan memiliki fungsi strategis karena berdampak pada aspek kesehatan; yaitu menjamin keamanan, khasiat, manfaat dan mutu obat dan makanan, juga berdampak pada aspek ekonomi; yaitu mendorong daya saing produk dan mencegah hilangnya pemasukan negara akibat produk obat dan makanan ilegal, serta berpengaruh pada aspek sosial; yaitu mencegah penyalahgunaan obat keras dan napza.

Pengawasan Obat dan Makanan dilakukan sejak sebelum beredar (*pre market*) melalui peningkatan inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan dalam rangka pemenuhan standar *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan *Good Distribution Practice* (GDP) terkini, serta penguatan kapasitas laboratorium, hingga pasca beredar (*post-market*) melalui pengambilan sampel dan pengujian, peningkatan cakupan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, dan Investigasi awal serta penyidikan kasus pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

BBPOM di Yogyakarta merupakan unit pelaksana teknis BPOM yang melaksanakan pengawasan *post-market* dan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

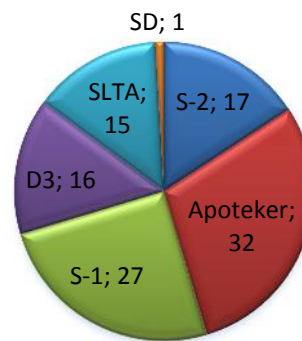
Mengingat luasnya cakupan pengawasan yang harus dilakukan maka BBPOM di Yogyakarta melakukan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dengan pemangku kepentingan di wilayah propinsi DIY yaitu dengan Gubernur, Bupati dan Walikota serta dengan Perguruan Tinggi di wilayah DIY.

## Analisis Lingkungan Strategis

### A. Internal

#### *Sumber Daya Manusia*

Jumlah pegawai BBPOM di Yogyakarta sebanyak 108 orang dengan penempatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan pada lingkup tugasnya. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikannya adalah sebagai berikut :



Gambar. 1 Jumlah karyawan berdasarkan pendidikan

#### *Sarana Prasarana*

Balai Besar POM di Yogyakarta dibangun di atas tanah dengan status kepemilikan Hak Pakai atas nama Pemerintah RI c.q Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Total luas tanah 6.477 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 5.615 m<sup>2</sup>, yang terbagi dalam 4 bangunan gedung yaitu Gedung Yudistira, Gedung Bima, Gedung Arjuna dan Gedung Nakula-Sadewa. Gedung tersebut selain berfungsi sebagai perkantoran juga termasuk fungsi layanan publik dan laboratorium.

#### *Peralatan Laboratorium*

Pengujian merupakan tulang punggung pengawasan Balai Besar POM di Yogyakarta, Laboratorium pengujian BBPOM di Yogyakarta telah terakreditasi ISO 17025 2017 sejak tahun 2002 dengan sertifikat akreditasi sebagai laboratorium penguji dari Komite Akreditasi Nasional dengan nomor sertifikat LP-125125-IDN, dan pada tahun 2018 telah dilakukan reakreditasi ke 4.

BBPOM di Yogyakarta memiliki laboratorium pengujian Kimia, Laboratorium pengujian Mikrobiologi dan Laboratorium Unggulan Baku Pembanding. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka laboratorium harus terus meningkatkan kapasitasnya agar pengawasan bisa lebih optimal. Laboratorium BBPOM di Yogyakarta dilengkapi dengan peralatan sesuai dengan standar minimal laboratorium dengan tingkat capaian pada tahun 2018 sebesar 78,02%

## Anggaran

Anggaran BBPOM di Yogyakarta bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2018 No SP DIPA-063.01.2.432778/2018 yang diterbitkan pada tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp. 38.942.072.000 dan mengalami beberapa revisi dengan anggaran terakhir sebesar Rp. 41.579.494.000,- (Empat Puluh Lima Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).

## B. Eksternal

### Kondisi geografis dan Demografis

Letak geografis DIY terletak di bagian selatan Pulau Jawa, yaitu pada 110° 00' - 110° 50' Bujur Timur dan 7° 33' - 8° 12' Lintang Selatan, tepatnya di sisi selatan dengan batas Samudra Hindia dan bagian lainnya berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, yaitu bagian Tenggara dengan Kabupaten Wonogiri, bagian Timur Laut dengan Kabupaten Klaten, bagian Barat Laut dengan Kabupaten Magelang dan Bagian Barat dengan Kabupaten Purworejo.

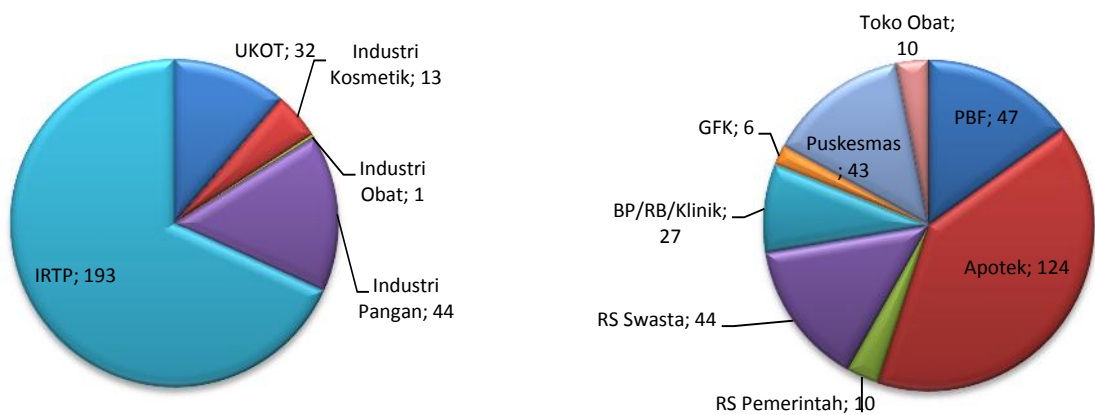
Cakupan wilayah pengawasan BBPOM di Yogyakarta meliputi seluruh wilayah administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), terdiri dari 4 (empat) kabupaten yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman dan 1 (satu) kota yaitu Kota Yogyakarta, dengan luas wilayah secara keseluruhan 3.185,80 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 3.818.266 (Data BPS tahun 2017)



Gambar 2. Wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta

### *Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi*

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah DIY meliputi industri farmasi, usaha kecil obat tradisional (UKOT), industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi obat meliputi Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota (GFK), RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan (BP)/ Rumah Bersalin (RB)/Klinik. Jumlah sarana produksi obat dan makanan dan sarana distribusi obat yang diawasi di wilayah DIY sebagaimana pada Gambar 3 tersebut di bawah ini:



*Gambar 3. Sarana produksi Obat dan Makanan dan sarana distribusi obat yang diawasi di propinsi DIY*

Berkembangnya industri di wilayah Propinsi DIY sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh pertumbuhan positif pada sebagian besar sektor perekonomian. Dari sisi produksi pertumbuhan didorong oleh peningkatan nilai tambah pada semua lapangan usaha. Berkembangnya organisasi budaya selain beragamnya potensi wisata alam yang menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun asing menjadikan DIY tujuan wisata favorit sehingga menunjang pertumbuhan ekonomi.

Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar dengan banyaknya perguruan tinggi yang menyebabkan banyak mahasiswa berdatangan dari berbagai daerah di Indonesia. Potensi anak muda ini turut menggerakkan potensi ekonomi diantaranya melalui media sosial. Perkembangan

industri pariwisata di Yogyakarta termasuk salah satu yang diuntungkan dari promosi di media sosial. Selain aspek positif, populasi anak muda yang besar juga memberikan potensi terhadap kemungkinan penyalahgunaan obat-obatan. Oleh karena itu pengawasan peredaran obat dan napza menjadi sangat penting.

Disektor pariwisata yang berkembang pesat baik itu wisata budaya maupun wisata alam, memberikan kontribusi yang signifikan pada perekonomian di Yogyakarta, diantaranya melalui wisata kuliner dan makanan oleh-oleh khas. Hal-hal tersebut menuntut pemerintah untuk memastikan bahwa makanan yang beredar di Yogyakarta aman dari bahan berbahaya.

### Isu Strategis

Isu strategis yang berkembang selama tahun 2018 yang mempengaruhi kinerja antara lain :

#### 1. Revolusi Industri 4.0

Revolusi industri generasi keempat ini ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, editing genetik dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak. Revolusi industri keempat, menjadi lompatan besar bagi sektor industri, dimana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya. Tidak hanya dalam proses produksi, melainkan juga di seluruh rantai nilai industri sehingga melahirkan model bisnis yang baru dengan basis digital guna mencapai efisiensi yang tinggi dan kualitas produk yang lebih baik.

Untuk itu, sektor industri nasional perlu banyak pembenahan terutama dalam aspek penguasaan teknologi yang menjadi kunci penentu daya saing di era Industry 4.0 karena sistem siber-fisik berkomunikasi dan bekerja sama satu sama lain dengan manusia secara bersamaan. Kemajuan di bidang industri harus diimbangi dengan pengembangan SDM tenaga pengawas untuk lebih memahami bahwa ketersediaan data tidak hanya hitam di atas putih dalam bentuk dokumen, namun bisa dalam bentuk data base dengan system *paperless*. Kemampuan seorang *Inspector* harus sebanding dengan kemajuan teknologi di era Revolusi Industri 4.0

#### 2. Terwujudnya Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) meningkatkan produk Tanpa Ijin Edar (TIE)

Dampak dari Revolusi Industri 4.0 adalah era globalisasi yang sudah tidak mungkin dihindari saat ini. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, terutama penggunaan internet yang kian meluas, membawa dampak nyata terbukanya ruang dan kesempatan baru dalam

transaksi perdagangan antar negara. Era teknologi yang tanpa batas menyebabkan aliran barang antar negara mudah terinformasikan dan mudah diperoleh. Untuk melindungi produknya, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau Asean Ekonomi Community telah resmi disahkan oleh Kepala Negara/Pemerintahan anggota ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke 27 tahun 2015 di Malaysia, dengan salah satu tujuan untuk meningkatkan daya saing kawasan secara keseluruhan di pasar dunia, yang berdampak pada tingginya ekspor-impor produk-produk antar negara ASEAN.

Pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ini memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara. Aturan antar negara ASEAN yang semakin longgar menyebabkan banyak produk-produk impor masuk ke Indonesia secara illegal. Indonesia adalah pasar terbesar produk obat dan makanan karena memiliki sekitar 250 juta penduduk yang merupakan 45% dari total penduduk ASEAN. Penjualan on line ataupun barang *tentengan* yang tadinya untuk keperluan sendiri beralih fungsi diperjualbelikan secara komersial. Di sisi lain tujuan MEA untuk melindungi produk ASEAN ternyata bisa menjadi bumerang dengan meningkatnya produk illegal karena semakin longgarnya peraturan antar Negara ASEAN.

### 3. Trend Penyebaran Informasi dan Transaksi Perdagangan Melalui Media Sosial dan Media On Line

Salah satu media sosial yaitu media *online* sangat membantu setiap individu dalam berkomunikasi dan dalam menyampaikan atau mendapatkan informasi, yang saat ini berkembang dengan sangat pesat. Berbagai macam informasi terkait obat dan makanan beredar dalam hitungan detik ke seluruh penjuru tanah air. Namun yang perlu menjadi kewaspadaan adalah informasi yang tidak benar justru lebih cepat menyebar dan menjadi *viral* di dunia maya. Peningkatan kemampuan SDM sangat diperlukan untuk mengklarifikasi berita-berita yang tidak sesuai, ekspektasi masyarakat memberi harapan yang tinggi terhadap Badan POM sebagai institusi tempat bertanya tentang Obat dan Makanan. Beberapa kegiatan penelusuran, sampling dan pengujian dilakukan untuk menjawab berita-berita di media sosial, selain itu dilakukan juga *sharing* informasi antara BBPOM di Yogyakarta dengan masyarakat melalui [www.facebook.com/bbpomjogja](http://www.facebook.com/bbpomjogja), [twitter@BBPOM\\_yogya](https://twitter.com/BBPOM_yogya), [instagram BBPOM\\_Yogyakarta](https://www.instagram.com/BBPOM_Yogyakarta), [blog bpom-yogya.blogspot.co.id](http://blog.bpom-yogya.blogspot.co.id) dan [website bbpom-yogya.pom.go.id](http://website.bbpom-yogya.pom.go.id).

Kemajuan teknologi ikut mempengaruhi tren cara penjualan produk di Indonesia, salah satunya melalui *online trading*. Pengawasan rutin menunjukkan bahwa praktek penjualan obat, suplemen kesehatan, OT, kosmetika dan makanan ilegal melalui situs internet semakin marak. Untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara *online* menjadi salah satu fokus pengawasan. BBPOM di Yogyakarta melalui kegiatan Pemberantasan Obat dan Makanan ilegal terus berkomitmen untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi persyaratan, termasuk obat dan makanan impor ilegal yang dipasarkan secara *online*.

4. Kemandirian pelaku usaha untuk peningkatan daya saing

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai potensi sangat besar untuk kemajuan perekonomian Indonesia, karena tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Mensejahterahkan UMKM akan berdampak besar bagi perekonomian negara Indonesia. Peran UMKM dalam perkembangan perekonomian suatu negara ini terbukti dengan berkurangnya pengangguran dan penciptaan usaha baru yang terus bermunculan. Dengan dibukanya MEA telah membuka kesempatan bagi UMKM untuk memasuki pasar baru. Namun UMKM Indonesia harus memperbaiki mutu produk untuk mampu bersaing di pasar ASEAN dan lebih luas lagi di pasar dunia. UMKM juga harus membuat persiapan yang matang dan membutuhkan strategi yang akan membuat UMKM di Indonesia tersebut bisa berdaya saing dan berani merebut pasar dengan aktif berpromosi dan melihat potensi diri.

Sebagai salah satu wujud dari misi kedua yaitu mewujudkan kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan obat dan makanan, Badan POM menggandeng Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memiliki produk yang aman dan mampu berdaya saing. Beberapa kegiatan berupa pendampingan dan bimbingan teknis telah dilakukan terhadap beberapa UMKM yang dianggap layak untuk “naik kelas” dari nomor P-IRT (Dinkes Kab/Kota) menjadi nomor MD dari Badan POM, serta bimbingan penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB).

5. “Kejahatan kemanusiaan” terkait pelanggaran di bidang obat dan makanan

Hasil analisis Badan POM menunjukkan bahwa kejahatan di bidang Obat dan Makanan semakin berkembang menggunakan modus baru yang mampu menyasar berbagai aspek, sehingga menciptakan dampak negatif secara masif baik langsung maupun jangka panjang

terhadap aspek kesehatan, ekonomi, hingga sosial masyarakat. Meminjam definisi dari UU no 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, bahwa kejahatan kemanusiaan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Potensi ancaman kejahatan Obat dan Makanan di samping berdampak negatif terhadap kesehatan, juga berdampak terhadap ekonomi negara akibat hilangnya pemasukan pajak dan bea masuk serta menekan daya saing dunia usaha. Lebih jauh, potensi ini dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk ketahanan bangsa bila tidak dilakukan langkah antisipasi.

Oleh karena itu sangat penting bagi Badan POM dan BBPOM di Yogyakarta melakukan kesepakatan bersama dengan instansi terkait untuk mempermudah proses pro justicia kasus pelanggaran di bidang obat dan makanan. Yang terpenting dari pengawasan itu adalah apabila mendapatkan pelanggaran, bisa dilakukan penindakan hukum, baik sanksi administrasi atau sanksi pidana, sehingga perwujudan obat dan makanan aman diharapkan dapat segera tercapai.

6. *Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)*

Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN bertujuan agar seluruh warga Negara Indonesia berkesempatan besar untuk memproteksi kesehatan mereka dengan lebih baik. Dengan hanya menyisihkan sebagian kecil uangnya, merekapun akan mampu menjadi peserta dan memperoleh manfaatnya. Seiring dengan diberlakukannya sistim JKN, maka paparan obat kepada masyarakat akan semakin banyak, oleh karena itu strategi sampling Badan POM untuk komoditi obat, sebagian besar difokuskan terhadap pengawalan obat-obat JKN. Obat-obat JKN menjadi sasaran sampling rutin dengan metode sampling dilaksanakan secara purposive-tergeted yaitu melalui pendekatan analisis risiko dan acak/random pada rantai distribusi obat e-katalog. Item obat yang disampling ditentukan berdasarkan kelas terapi dengan proporsi yang telah ditentukan. Dengan pengetatan prosedur sampling, diharapkan kesimpulan yang diambil dari masing-masing jenis obat JKN menjadi valid dan dapat dijadikan acuan dalam mengambil kebijakan selanjutnya.

7. *Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Kota Tujuan Wisata*

Berdasarkan UU no 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, dengan memperhatikan aspek historis, sosiologis dan yuridis substansi Keistimewaan DIY diletakkan pada tingkat Provinsi. Selain mengatur tentang kewenangan dan jabatan Gubernur DIY, keistimewaan berakibat juga terhadap kucuran dana yang meningkat untuk menunjang predikat “istimewa”

yang salah satunya digunakan untuk pengembangan potensi budaya. Dengan adanya danais (dana keistimewaan), Yogyakarta semakin bersolek untuk menunjukkan jati diri sebagai kota budaya dan kota wisata.

Dari tahun-tahun terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap kunjungan wisatawan domestik maupun manca negara. Kondisi ini menjadikan aneka kuliner dan pangan khas daerah menjadi semakin banyak diproduksi. Meskipun sebagian besar adalah pangan siap saji dan pangan Industri Rumah Tangga, namun BBPOM di Yogyakarta tidak bisa tutup mata dengan melempar kewenangan terhadap pemerintah daerah. Sebagai institusi yang telah dipercaya masyarakat untuk mengawal peredaran pangan yang aman, sudah semestinya BBPOM di Yogyakarta peduli dan ikut melakukan pengawalan. Ada banyak sentra industri oleh-oleh dan banyak pula kuliner-kuliner yang bermunculan sebagai penyedia jasa wisata. Tanggung jawab untuk ikut memajukan perekonomian Yogyakarta dari sisi peredaran pangan aman dan layak dikonsumsi, menjadi salah satu target dalam agenda pengawasan yang dilakukan BBPOM di Yogyakarta.

#### 8. Reformasi Birokrasi

BBPOM di Yogyakarta merupakan salah satu unit kerja yang disiapkan Badan POM menjadi wilayah Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Pencanaan Pembangunan ZI menuju WBK-WBBM telah dilaksanakan bulan Juli tahun 2016 dengan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Kepala BBPOM di Yogyakarta dan seluruh staf. Ditahun 2018 ini, dalam rangka Pembangunan ZI menuju WBK-WBBM upaya yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

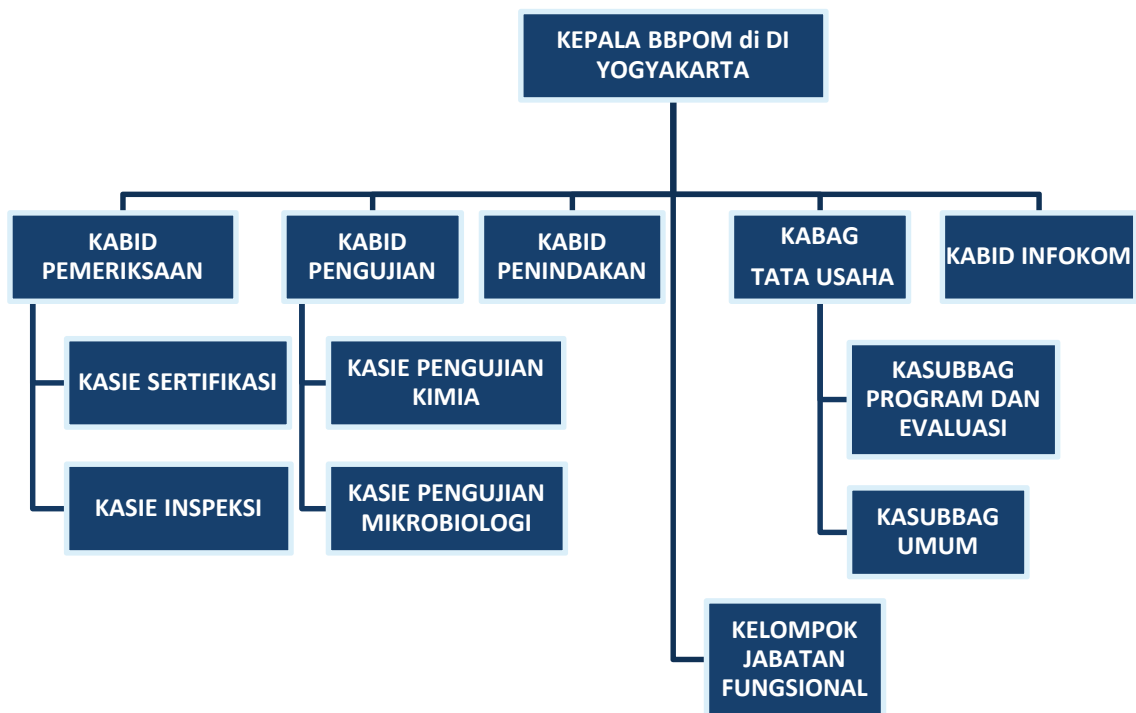
- a. Melaksanakan manajemen perubahan dengan koordinator Tim Pembangunan ZI menuju WBK- WBBM
- b. Penataan Tatalaksana dengan dibuatnya prosedur operasional.
- c. Peningkatan layanan informasi publik menggunakan teknologi informasi melalui media sosial seperti *blogspot*, *face book*, *twitter*, *instagram* dan *website*
- d. Penataan Sistem Manajemen SDM
- e. Penguatan Akuntabilitas
- f. Penguatan Pengawasan dilaksanakan dengan Pengendalian Gratifikasi, penerapan *Whistle-Blowing System*, penanganan benturan kepentingan dan penerapan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan membentuk tim SPIP dan tim Satuan Pemeriksa Internal (SPI).

- g. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

## B. Struktur Organisasi

Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar di Yogyakarta sesuai Keputusan Kepala Badan POM terbaru yaitu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang terdiri dari : Kepala; Bidang Pengujian; Bidang Pemeriksaan; Bidang Penindakan; Bidang Informasi dan komunikasi; Bagian Tata usaha; dan Kelompok Jabatan fungsional, seperti pada Gambar 4.



Gambar 4. Struktur Organisasi BBPOM di Yogyakarta

Unit-unit kerja di Balai Besar POM di Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

### **1. Bidang Pengujian**

Tugas pokoknya adalah melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Adapun fungsinya adalah 1). Penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan; 2). Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan; dan 3). Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Bidang Pengujian terdiri atas : 1). Seksi Pengujian Kimia yang mempunyai tugas melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan; 2). Seksi Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi Obat dan Makanan.

### **2. Bidang Pemeriksaan**

Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/ fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

Fungsi Bidang pemeriksaan adalah: 1). Penyusunan rencana dan program; 2). Pelaksanaan inspeksi sarana/ fasilitas produksi dan distribusi Obat dan makanan; 3). Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan distribusi produk obat dan makanan; 4). Sampling Obat dan makanan; 5). Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan sampling produk obat dan makanan.

Bidang pemeriksaan terdiri atas : Seksi Inspeksi yang bertugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan dan Seksi Sertifikasi yang bertugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/ atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.

### **3. Bidang Penindakan**

Bidang Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

pengawasan obat dan makanan.

Fungsi Bidang Penindakan : 1). Penyusunan rencana program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan; 2).pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan 3). Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

#### **4. Bidang Informasi dan Komunikasi**

Bidang Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi : a) penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan makanan; b). Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan; c). Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan d). Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawsan Obat dan Makanan.

#### **5. Bagian Tata Usaha**

Bidang Tata usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Bidang tata usaha menyelenggarakan fungsi : a). Penyusunan rencana, program dan anggaran; b). Pelaksanaan pengelolaan keuangan; c). Pengelolaan persuratan dan kearsipan; d). Pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana; e). Pelaksanaan urusan kepegawaian; f). Pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana; f). Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; g). Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan h).

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Bagian Tata Usaha terdiri atas : Subbagian Program dan Evaluasi yang mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan kinerja dan Subbagian Umum yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

## **6. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas : “Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dengan ketentuan : a) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan Fungsional lain sesuai dengan bidang keahliannya; b) masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasi oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Utama Badan POM; c) jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan d) jenis dan jenjang fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# BAB II

# PERENCANAAN KINERJA



## BAB II. PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) BBPOM di Yogyakarta Tahun 2015-2019 ditetapkan dengan Surat Kepala BBPOM di Yogyakarta Nomor HK.06.02.96.04.15.3125 tanggal 20 April 2015 dan telah disusun mengacu pada Rencana Strategis Badan POM 2015-2019.

Review Renstra telah dilakukan untuk menyesuaikan hasil evaluasi indikator sasaran strategis dengan ditetapkan Surat Kepala BBPOM di Yogyakarta Nomor HK.01.02.95.02.18.1915, tanggal 20 Februari 2018.

Adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) UPT di lingkungan Badan POM sesuai Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM, maka dilakukan revisi Renstra berdasarkan Surat Keputusan Kepala BBPOM di Yogyakarta Nomor HK.01.02.95.09.18.8544 pada tanggal 14 September 2018.

Renstra tersebut berisi visi, misi, sasaran kegiatan, indikator kegiatan, target tahunan, arah kebijakan dan strategi BBPOM di Yogyakarta.





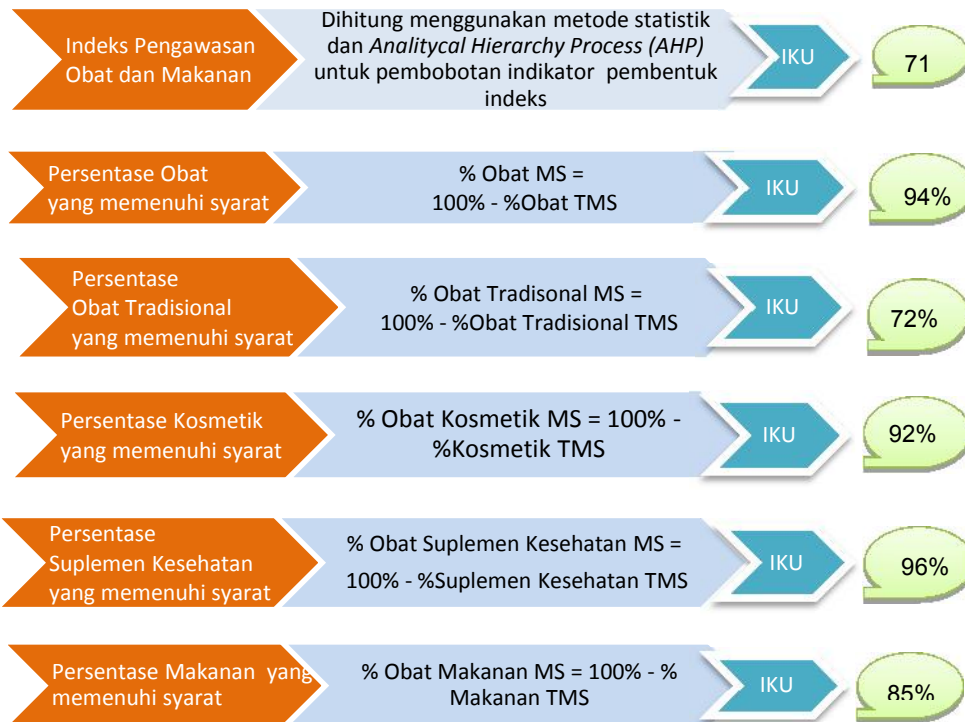
**TUJUAN**

- Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan yang aman
- Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi

Untuk mencapai Tujuan dalam rangka mewujudkan Misi dan Visi dirumuskan sasaran strategis sebagai berikut :

**Sasaran Kegiatan 1** •Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu

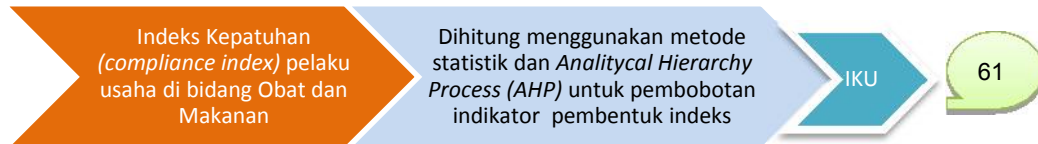
Untuk mengukur pencapaian sasaran kegiatan ini ditetapkan 6 indikator kegiatan, cara pengukuran dan target masing-masing indikator sebagai berikut :



Sasaran Kegiatan 2

- Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan

Untuk mengukur pencapaian sasaran kegiatan ini ditetapkan 1 indikator kegiatan, cara pengukuran dan target indikator tersebut sebagai berikut



Sasaran Kegiatan 3

- Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman

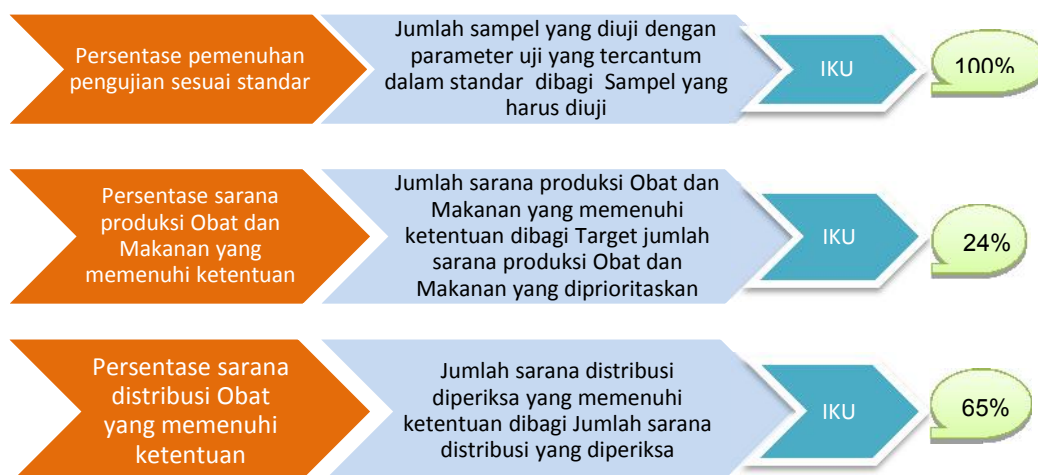
Untuk mengukur pencapaian sasaran kegiatan ini ditetapkan 1 indikator kegiatan, cara pengukuran dan target indikator tersebut sebagai berikut

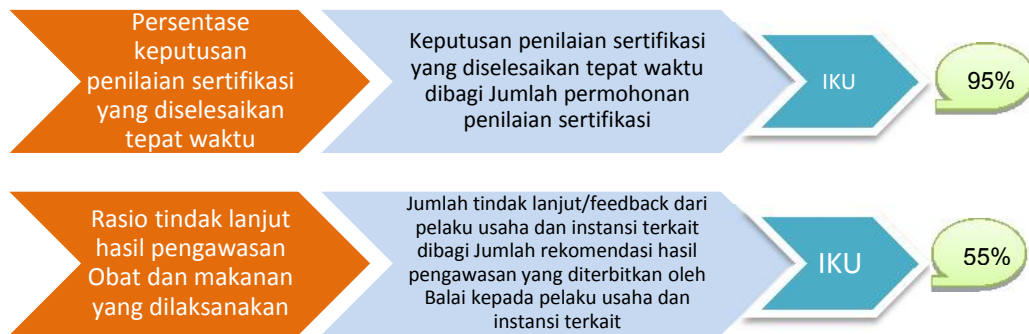


Sasaran Kegiatan 4

- Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko

Untuk mengukur pencapaian sasaran kegiatan ini ditetapkan 5 indikator kegiatan, cara pengukuran dan target indikator tersebut sebagai berikut

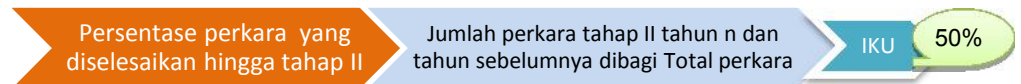




**Sasaran Kegiatan 5**

- Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan

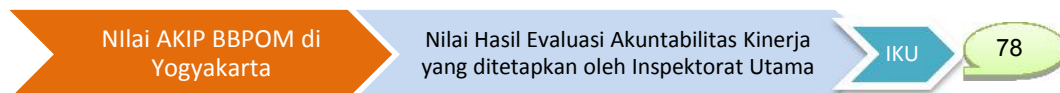
Untuk mengukur pencapaian sasaran kegiatan ini ditetapkan indikator kegiatan, cara pengukuran dan target sebagai berikut :



**Sasaran Kegiatan 6**

- Terwujudnya RB sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019

Untuk mengukur pencapaian sasaran kegiatan ini ditetapkan indikator kegiatan, cara pengukuran dan target sebagai berikut :



## B. Perencanaan Kinerja Tahunan

### 1. Rencana Kinerja Tahunan

Dokumen rencana kinerja tahunan telah disusun yang memuat sasaran, indikator dan target tahunan yang akan dicapai serta strategi untuk mencapai sasaran tersebut yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pengajuan usulan kegiatan dan anggaran. Dokumen tersebut disusun mengacu pada renstra dituangkan di Lampiran 4.

### 2. Perjanjian Kinerja Tahunan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, maka BBPOM di Yogyakarta sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala BBPOM di

Yogyakarta) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dituangkan dalam Pernyataan Perjanjian Kinerja Nomor OR.03.95.01.18.0225 tanggal 2 Januari 2018. Adapun Lampiran Perjanjian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 (SOTK lama)**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>			
1	SP.1 Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan.	1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat	93,50%
		1.2. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	55,56%
		1.3. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	92,00%
		1.4. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	82,00%
		1.5. Persentase makanan yang memenuhi syarat	89,60%
2	SP.2 Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	2.1. Tingkat Kepuasan Masyarakat	73,72%
		2.2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan	5 Kab/Kota
3	SP.3 Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	3.1 Nilai SAKIP BBPOMdari Badan POM	78
<b>SP.1. Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan</b>			
1	1.1. Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1.1.1 Sampel Makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	1140 sampel
		1.1.2 Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diuji menggunakan parameter kritis	2660 sampel
2	1.2. Meningkatnya kualitas sarana	1.2.1 Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	100%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	produksi yang memenuhi standar		
3	1.3. Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	1.3.1. Persentase cakupan pemeriksaan sarana distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan	40%
		1.3.2. Persentase Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian (Saryanfar)	35%
4	1.4. Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	1.4.1. Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	9 perkara
<b>SP.2. Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat</b>			
1	2.1. Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	2.1.1. Jumlah layanan publik BBPOM di Yogyakarta	1125 layanan
		2.1.2. Jumlah komunitas yang diberdayakan	39 komunitas
		2.1.3. Sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	98 Sekolah
<b>S.P.3. Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan</b>			
1	3.1. Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	3.1.1. Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	79,66%
2	3.2. Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	3.2.1. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9 dokumen

**Kegiatan**  
 Pengawasan Obat dan Makanan  
 di BBPOM Di Yogyakarta

**Anggaran**  
 Rp. 38.942.072.000,-

Pada bulan Februari 2018 terjadi pergantian Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta dari Dra I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt ke Dra Sandra Maria Philomena Linthin, Apt., M.Kes, yang diikuti dengan Perjanjian Kinerja No OR.3.95.03.18.2248 pada 5 Maret 2018. Kemudian terjadi perubahan SOTK baru sehingga Perjanjian Kinerja tersebut diperbarui pada 14 September 2018.

Di akhir bulan September terjadi pergantian Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta dari Dra Sandra Maria Philomena Linthin, Apt., M.Kes ke Dra Rustyawati, Apt. M.Kes., Epid, sehingga dibuat Perjanjian Kinerja yang baru sebagaimana tersebut pada Tabel 2.

**Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 (SOTK baru)**

No	Sasaran /Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
<b>RENJA 2018 (OTK Lama)</b>			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik, Suplemen Kesehatan yang diuji menggunakan parameter kritis	2660
		Jumlah sampel Makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	1140
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	100%
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi OT, Kosmetik, suplemen Kesehatan dan Makanan	40%
		Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan sarana Pelayanan Kefarmasian (Saryanfar)	35%
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	10
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	90%
6	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9
7	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BB/BPOM	1410
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	46

No	Sasaran /Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
<b>Peta Strategi (OTK Baru)</b>			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi DIY	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	71,00
		Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,00
		Persentase Obat tradisional yang memenuhi syarat	72,00
		Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	92,00
		Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	96,00
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	85,00
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (compliance index)pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	61,00
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	61,00
4	Meningkatnya efektifitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	24,00
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	65,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,00
		Rasio tindak lanjut pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan	55,00
5	Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	50
6	Terwujudnya RB BB/BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP	78,00

**Kegiatan**  
 Pengawasan Obat dan Makanan  
 di BBPOM Di Yogyakarta

**Anggaran**  
 Rp. 41.579.495.000,-

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau kinerja triwulanan dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi. Untuk itu telah dibuat rencana aksi Perjanjian Kinerja triwulan, sehingga capaian kinerja bukan dikumpulkan pada saat penyusunan laporan kinerja tetapi dimonitor dan dievaluasi per triwulan.

### C. Kriteria Pencapaian Indikator

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing - masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan seperti rumus di bawah ini :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sasaran kegiatan dengan 1 (satu) indikator kinerja kegiatan, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing - masing indikator. Untuk masing - masing indikator memiliki bobot yang sama. Khusus untuk IKU, memiliki bobot 2 (dua) kali dibandingkan indikator yang lain.

Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) :

Sasaran Kinerja 1 " Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi DIY "

$$NPS1 = \frac{2NPI1 + 2NPI2 + 2NPI3 + 2NPI4 + 2NPI5}{10}$$

Sasaran Kegiatan 2 " Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan "

$$NPS2 = NPI1$$

Kriteria capaian kinerja adalah sebagai berikut :





# BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

## BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan cara perhitungan Nilai Pencapaian yang dijelaskan pada BAB II, secara ringkas capaian sasaran kegiatan tersebut dalam Tabel 3 berikut :

Tabel 3. Pencapaian Sasaran Kegiatan

No.	Sasaran Kegiatan	Nilai Capaian Sasaran (%)	Kriteria
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	101,07%	Memuaskan
2.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	119,41%	Memuaskan
3.	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	108,07%	Memuaskan
4.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	105,89%	Memuaskan
5.	Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan	107,00%	Memuaskan
6.	Terwujudnya RB sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	94,33%	Cukup

#### Analisis Akuntabilitas Kinerja

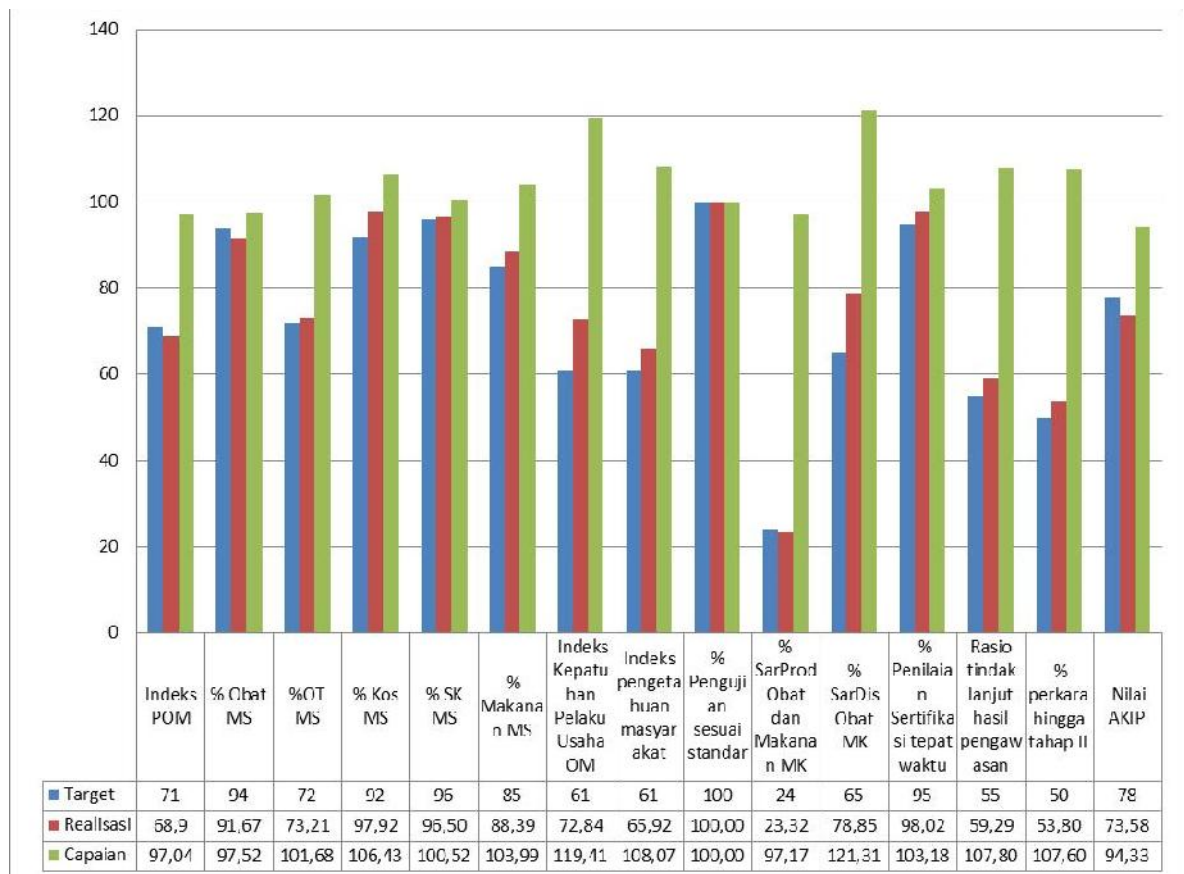
Pada revisi Rencana Strategis BBPOM di Yogyakarta tahun 2015-2019 telah menetapkan 6 (lima) sasaran kegiatan. Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut ditetapkan 15 (empat belas) indikator kinerja kegiatan, yang kesemuanya merupakan indikator kinerja utama (IKU).

#### PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan 15 **Indikator Kinerja Utama (IKU)** , yaitu:

1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan
2. Persentase Obat yang memenuhi syarat
3. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat
4. Persentase Kosmetika yang memenuhi syarat
5. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat

6. Persentase Makanan yang memenuhi syarat
7. Indeks Kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha dibidang Obat dan Makanan
8. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman
9. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar
10. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
11. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan
12. Persentase kepatuhan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
13. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan
14. Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II
15. Nilai AKIP BBPOM di Yogyakarta



Gambar 5. Profil Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Dari 15 (lima belas) IKU yang telah ditetapkan pada tahun 2018, sebelas (11) diantaranya dapat mencapai target yang ditetapkan ( $100\% < X < 125\%$ ) dengan kategori memuaskan, empat (4) masuk kategori cukup dengan nilai capaian ( $75\% < X < 100\%$ ).

### A.1. PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN 1

#### Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu

Tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan 1 “Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu” terlihat pada capaian masing-masing indikator. Ada empat nilai capaian indikator berada dalam range  $100\% < X < 125\%$  dengan kriteria memuaskan dan 2 indikator dengan nilai capaian dalam range  $75\% < X < 100\%$  dengan kriteria cukup. Data lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-1

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR (%)	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR
Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	71	68,9	97,04	Cukup
	Persentase obat yang memenuhi syarat	94,00%	91,67%	97,52%	Cukup
	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	72,00%	73,21%	101,68%	Memuaskan
	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	92,00%	97,92%	106,43%	Memuaskan
	Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	96,00%	96,50%	100,52%	Memuaskan
	Persentase makanan yang memenuhi syarat	85,00%	88,39 %	103,99%	Memuaskan

### A.1.1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan

Tabel 5. Pencapaian Indikator Kinerja ke 1 pada Sasaran Kegiatan ke-1

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR (%)	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR
Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	71	68,90	97,04%	Cukup

Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BBPOM di Yogyakarta yang diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi, yaitu pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha. Perhitungan IPOM menggunakan metode statistik dan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks.

Realisasi Capaian IPOM pada tahun 2017 adalah 68,90, jika dibandingkan dengan target 2018 (71), maka nilai capaiannya adalah 97,04% dari target dengan kategori cukup. Penilaian IPOM ini merupakan nilai kumulatif dari capaian-capaian kinerja BBPOM di Yogyakarta, oleh karena itu untuk dapat memenuhi target IPOM di tahun 2019 (71%) perlu kerja keras untuk meningkatkan capaian pada semua aspek indikator kinerja.

Pencapaian IPOM BBPOM di Yogyakarta (97,04%) jika dibandingkan dengan BBPOM sekluster yaitu BBPOM Pontianak (85,57%), BBPOM Banjarmasin (90,71%) dan BBPOM Aceh (86,90%), maka capaian BBPOM di Yogyakarta paling tinggi, hal ini tidak lepas dari usaha semua pihak dan kerjasama yang baik dengan lintas sektor terkait dalam pengawasan obat dan makanan di wilayah DIY.

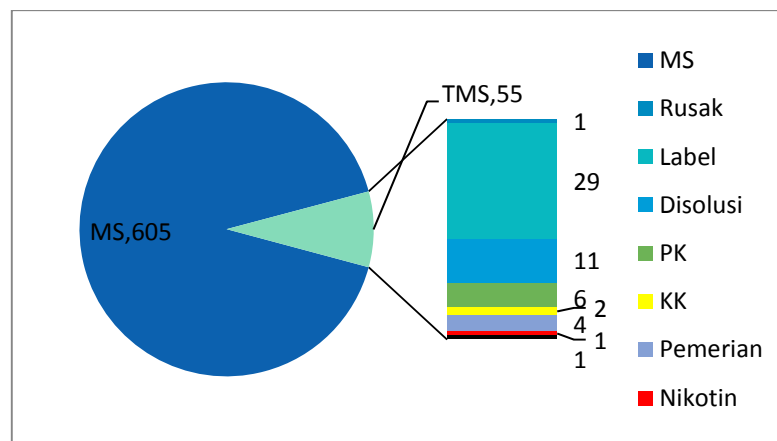
### A.1.2. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat (MS)

Tabel 6. Pencapaian Indikator Kinerja ke 2 pada Sasaran Kegiatan ke-1

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR (%)	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR
Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu	Persentase obat yang memenuhi syarat	94,00%	91,67%	97,52%	Cukup

Nilai capaian indikator kinerja persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2018 adalah 97,52%. Pada DO tahun 2018 disebutkan bahwa kriteria obat tidak memenuhi syarat (TMS) meliputi obat yang tidak memiliki Nomor ijin Edar (NIE), obat kadaluwarsa/rusak, obat yang tidak memenuhi ketentuan penandaan dan TMS berdasarkan pengujian, sedangkan pada metode sampling masih mengacu pada DO yang lama.

Profil sampel obat yang TMS terlihat pada Gambar 6 berikut, dimana jumlah sampel TMS bertambah secara bermakna dengan dihitungnya TMS penandaan. Jumlah sampel yang TMS penandaan di tahun 2018 adalah 29 sampel atau 52% dari total sampel yang TMS. Terhadap sampel obat yang TMS penandaan telah dilaporkan secara SIPT yang ditindak lanjuti oleh Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Import Obat dan Napza, Deputi I Badan POM.



Gambar 6. Profil obat TMS

Realisasi capaian indikator kinerja persentase obat yang MS tahun 2018 (91,67%) apabila dibandingkan dengan target 2019 (94,50%), maka nilai capaiannya adalah 97% masih dibawah target yang diharapkan. Sehingga perlu dilakukan strategi untuk meningkatkan capaian antara lain dengan lebih mengintensifkan :

- pembinaan dan pengawasan terhadap industri farmasi melalui audit CPOB
- pembinaan terhadap sarana distribusi obat untuk menerapkan CDOB, sehingga tidak ditemukan obat yang TMS karena kadaluwarsa maupun rusak
- pengawasan dan pelaporan penandaan melalui SIPT sesuai *timeline*
- pemberian sanksi yang tegas terhadap sarana/pelaku usaha yang melanggar, sesuai aturan yang berlaku.

Apabila dibandingkan dengan target pada standar nasional yaitu 93,5%, maka capaian BBPOM Yogyakarta adalah 98,08%. Dan apabila dibandingkan dengan capaian dari BBPOM cluster 3 yaitu BBPOM Pontianak (97,54%), BBPOM Banjarmasin (105,72%), dan BBPOM Aceh (100,90%), maka capaian BBPOM di Yogyakarta sama dengan nilai capaian BBPOM Pontianak, namun lebih rendah dari nilai capaian BBPOM Banjarmasin dan BBPOM Aceh.

Sejak tahun 2017 sampling obat telah dilakukan dengan metode acak untuk memenuhi aspek keterwakilan sampel obat dipasaran. Selain itu juga telah dilakukan sampling untuk obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sebagai pengawasan terhadap kualitas obat JKN.

### A.1.3. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat (MS)

Tabel 7. Pencapaian Indikator Kinerja ke 3 pada Sasaran Kegiatan ke-1

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR (%)	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR
Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	72,00%	73,21%	101,68%	Memuaskan

Capaian indikator kinerja Obat Tradisional yang memenuhi syarat tahun 2018 adalah 73,21% atau nilai capaiannya 101,68%. Nilai capaian tersebut masuk dalam kategori memuaskan. Keberhasilan pencapaian target tersebut dikarenakan telah dilakukan kegiatan-kegiatan berikut:

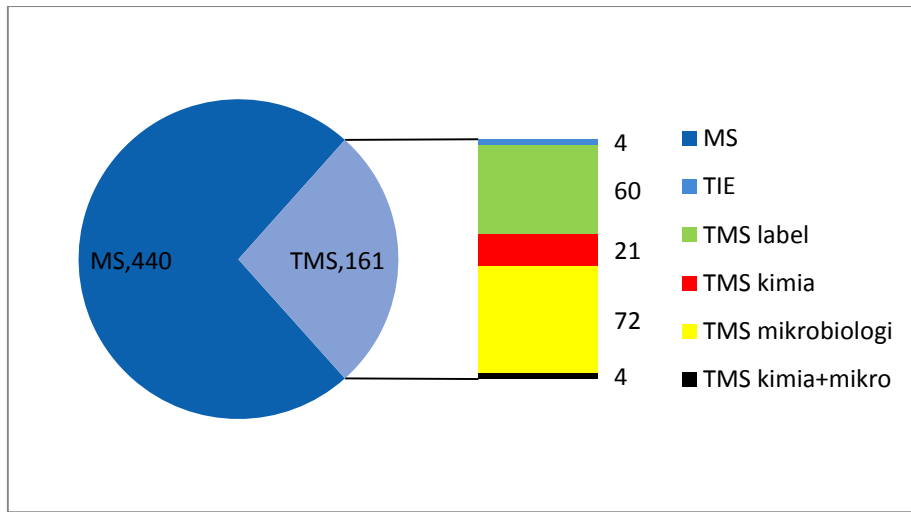
- pembinaan dan pengawasan terhadap sarana produksi obat tradisional melalui audit CPOTB terhadap 1 industri obat tradisional di Yogyakarta, sehingga produk obat tradisional yang dihasilkan memenuhi standar dan juga pembinaan kepada pelaku usaha (*regulatory assistance*) kepada pengusaha Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional pada saat petugas melakukan audit dalam rangka permohonan ijin produksi agar memenuhi standar yang berlaku.
- pengawasan dan pelaporan penandaan melalui SIPT sesuai *timeline*
- pemberian sanksi yang tegas terhadap sarana/pelaku usaha yang melanggar, sesuai aturan yang berlaku.
- Penyuluhan dan penyebaran informasi tentang Keamanan Obat, Obat tradisional, Kosmetik dan Pangan kepada masyarakat melalui mahasiswa KKN UGM sebanyak 500 orang
- Pelaksanaan pemusnahan terhadap 114 jenis produk obat tradisional senilai Rp. 90.495.500,- yang merupakan barang sitaan saat penyidikan diharapkan dapat memberikan efek jera kepada produsen dan distributor yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

Apabila dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2019 (70,0%), maka capaian ditahun 2018 ini adalah 104,59%. Penurunan target pada tahun 2019 dikarenakan sistem sampling yang berbeda dibandingkan tahun 2018 dan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 sistem sampling yang diterapkan adalah porposif, dimana sampel NIE, rusak maupun kadaluwarsa yang ditemukan langsung ditindak lanjuti tanpa dimasukkan sebagai sampel. Namun pada tahun 2019 dilakukan kombinasi sistem sampling, yaitu 60% purposif dan 40% acak, sehingga apabila pada waktu acak ditemukan sampel kategori NIE, rusak maupun kadaluwarsa tetap dicatat sebagai sampel (meskipun tidak dilakukan uji laboratorium), dan langsung di tindaklanjuti. Sehingga diprediksi jumlah sampel TMS meningkat dibandingkan tahun 2018.

Agar target ditahun 2019 tercapai dibutuhkan intensifikasi pembinaan terhadap pelaku usaha baik itu produsen dalam memenuhi persyaratan CPOTB maupun distributor obat tradisional untuk menjamin produk yang disalurkan adalah produk yang terdaftar, tidak kadaluwarsa dan tidak rusak. Selain itu intensifikasi pengawasan penandaan dan pembinaan atau sosialisasi penandaan kepada UKOT/UMOT perlu dilaksanakan.

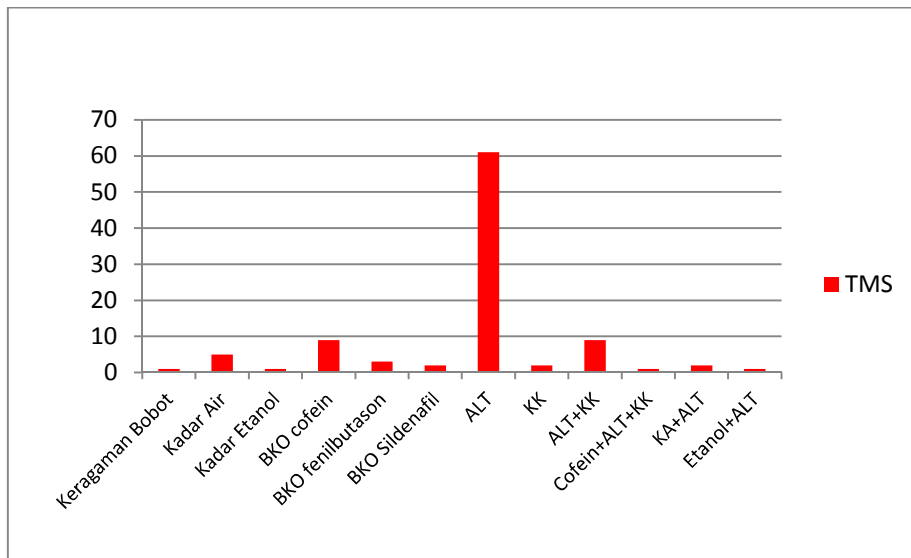
Apabila dibandingkan dengan capaian dari BBPOM kluster 3 yaitu BBPOM Pontianak (112,25%), BBPOM Banjarmasin (111,58%) dan BBPOM Aceh (111,45%), maka semuanya telah mencapai kategori memuaskan. Hal-hal penunjang tercapainya target ini perlu dipertahankan dan bahkan harus ditingkatkan.

Profil sampel Obat Tradisional yang tidak memenuhi persyaratan pada tahun 2018 dapat dilihat pada Gambar 7 berikut:



Gambar 7. Profil Obat Tradisional TMS

Dari Gambar 7 tersebut di atas terlihat bahwa 3 besar kategori OT yang TMS adalah TMS pengujian mikrobiologi (44,72%), TMS label (37,27%) dan TMS pengujian kimia (13,04%).



Gambar 8. Profil Hasil Pengujian Obat Tradisional TMS Mutu secara Kimia dan Mikro

Pada Gambar 8 tampak bahwa sebagian besar TMS uji mikro tersebut adalah pada Angka Lempeng Total. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha belum menerapkan prinsip higiene dan sanitasi pada saat produksi.

#### A.1.4. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat (MS)

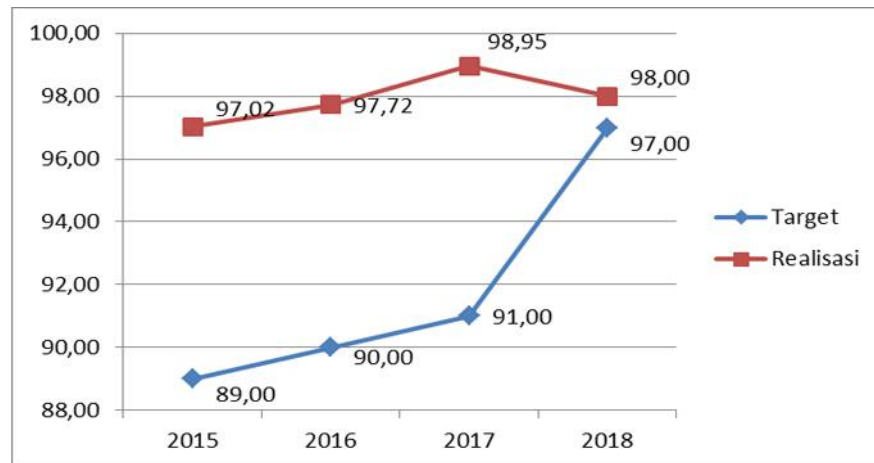
Tabel 8. Pencapaian Indikator Kinerja ke 4 pada Sasaran Kegiatan ke-1

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR (%)	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR
Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	92,00%	97,92%	106,43%	Memuaskan

Persentase kosmetik yang MS pada tahun 2018 adalah 97,92%, sedangkan target di tahun 2018 adalah 92,00%, atau mencapai 106,43% dari target dengan kriteria memuaskan. Keberhasilan pencapaian target disebabkan antara lain oleh :

- Penyuluhan dan penyebaran informasi melalui Kampanye cerdas menggunakan kosmetik untuk generasi milenial yang diikuti oleh 240 anak usia muda
- Pengawasan dan pelaporan penandaan melalui SIPT sesuai *timeline*
- Penerapan sanksi (proses projustitia maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana produksi maupun distribusi yang melakukan pelanggaran antara lain memproduksi kosmetika mengandung bahan berbahaya, menjual kosmetika tanpa ijin edar, menjual kosmetika yang sudah ditarik dari peredaran.
- Pelaksanaan pemusnahan terhadap 68 jenis produk kosmetik senilai Rp. 50.540.000,- yang merupakan barang sitaan saat penyidikan diharapkan dapat memberikan efek jera kepada produsen dan distributor yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

Definisi operasional dari indikator ini sama dengan tahun sebelumnya, sehingga bisa dibandingkan capaian tahun ini dengan capaian tahun sebelumnya pada periode Renstra 2015-2019 seperti pada Gambar 9 berikut :



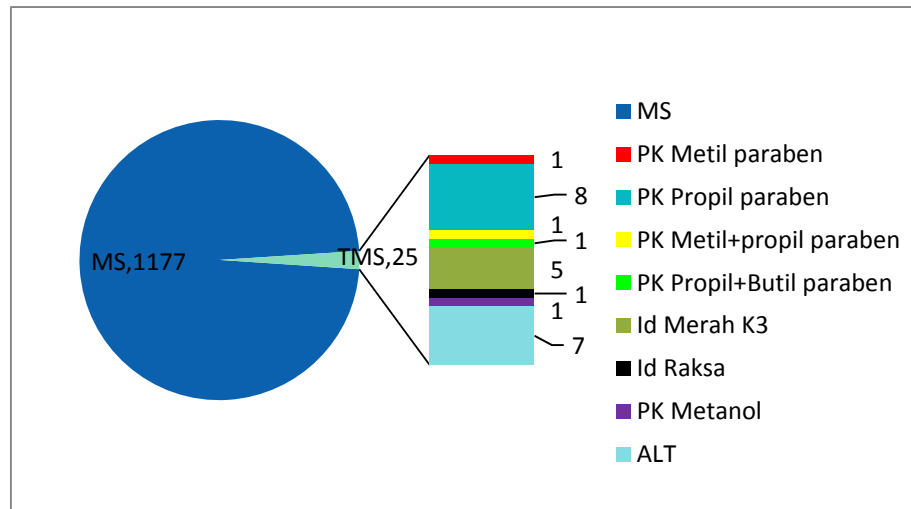
Gambar 9. Profil Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat (2015-2018)

Berdasarkan Gambar 9, terlihat bahwa Persentase kosmetik yang MS mengalami kenaikan selama 2015-2017, namun pada tahun ini mengalami penurunan sebesar 1,03%. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kosmetik yang TMS di peredaran makin meningkat. Penyebab kenaikan jumlah sampel yang TMS pengujian adalah terkait dengan mulai diberlakukannya peraturan Kepala Badan POM No 18 Tahun 2015 tentang perubahan nilai persyaratan kadar pengawet propil paraben, butil paraben dan turunan paraben yang lain, setelah masa tenggang pemberlakuan peraturan berakhir. Untuk itu pembinaan terhadap produsen kosmetik mengenai CPKB dan sosialisasi peraturan kosmetika perlu ditingkatkan, agar kosmetik yang beredar di masyarakat lebih terjamin mutu dan kemamanannya.

Pada revisi Renstra 2018-2019 target indikator persentase kosmetik yang memenuhi syarat di tahun 2019 adalah 83%. Target tersebut mengalami penurunan yang signifikan yaitu 9% dari tahun 2018. Hal tersebut dikarenakan definisi operasional pada sampel TMS tahun 2019 berubah, yaitu TMS tanpa NIE, kadaluwarsa/rusak, penandaan dan pengujian. Dengan bertambahnya kriteria TMS, maka diprediksi jumlah sampel produk Kosmetik yang TMS pada tahun 2019 akan meningkat, terlebih metode sampling yang digunakan selain purposive (60%), juga metode sampling acak (40%).

Target Badan POM tahun 2018 pada indikator ini sama dengan target BBPOM di Yogyakarta yaitu 92%, atau nilai capaiannya 106,43%. Apabila dibandingkan dengan capaian dari BBPOM cluster 3 yaitu BBPOM Pontianak (93,67%), BBPOM Banjarmasin (106,83%) dan BBPOM Aceh (107,53%), maka capaian BBPOM Yogyakarta sama dengan BBPOM Aceh dan BBPOM Banjarmasin, yaitu pada kriteria memuaskan.

Profil hasil pengujian kosmetika tahun 2018 terlihat pada Gambar 10 berikut



Gambar 10. Profil Hasil Pengujian Kosmetik

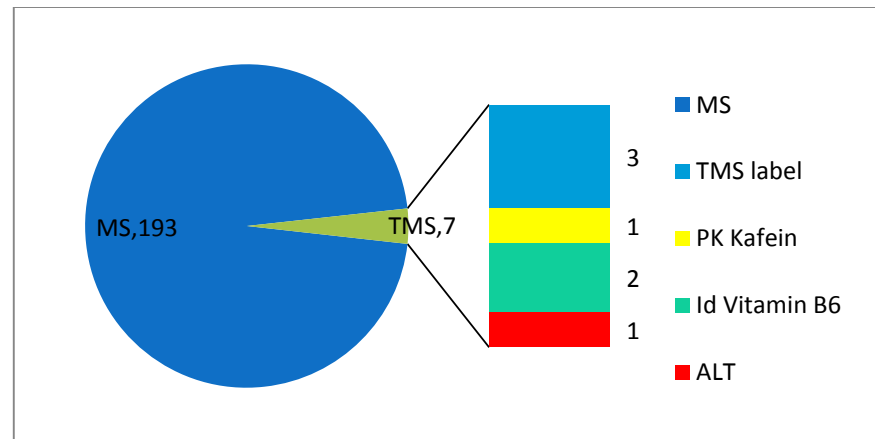
#### A.1.5. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat (MS)

Tabel 9. Pencapaian Indikator Kinerja ke 5 pada Sasaran Kegiatan ke-1

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR (%)	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR
Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu	Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	96,00%	96,50%	100,52%	Memuaskan

Persentase suplemen kesehatan yang MS pada tahun 2018 adalah 96,50%, bila dibandingkan dengan target 2018 (96,00%), maka capaiannya adalah 100,52%, dengan kriteria memuaskan. Keberhasilan pencapaian target tersebut tak lepas dari kegiatan pembinaan yang dilakukan terhadap distributor suplemen kesehatan agar turut serta menjamin produk yang didistribusikan merupakan produk yang legal, tidak kadaluwarsa dan rusak.

Pada Gambar 11 berikut adalah profil hasil pengujian sampel Suplemen Kesehatan:



Gambar 11. Profil Hasil Pengujian Suplemen kesehatan

Dari Gambar 11 tersebut di atas, tampak bahwa dari 7 sampel yang TMS, tiga diantaranya (42,86%) adalah TMS label. Sehingga perlu dilakukan pengawasan yang lebih intensif dan pelaporan mengenai kesesuaian penandaan sehingga dapat dilakukan tindak lanjut oleh Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Badan POM RI

Apabila capaian persentase suplemen kesehatan yang MS tahun 2018 ini dibandingkan dengan target tahun 2019 (97%), maka nilai capaiannya adalah 99,48%. Tantangan pencapaian target pada tahun 2019 semakin bertambah dengan sistem sampling yang diterapkan yaitu 40% acak, sehingga diperlukan intensifikasi pembinaan terhadap pelaku usaha baik distributor maupun produsen di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta.

Apabila dibandingkan dengan target pada standar nasional yaitu 82%, maka capaian BBPOM Yogyakarta adalah 117,68%. Dan apabila dibandingkan dengan capaian dari BBPOM cluster 3 yaitu BBPOM Pontianak (118,30%), BBPOM Banjarmasin (121,95%), dan BBPOM Aceh (118,81%), maka capaian keempat BBPOM tersebut sama yaitu pada kategori memuaskan. Hal yang patut diapresiasi bahwa capaian BBPOM Yogyakarta terpenuhi meskipun target yang ditetapkan lebih tinggi (96%) dari target Nasional (82%), sehingga dapat disimpulkan bahwa peredaran Suplemen Kesehatan di wilayah DIY sudah baik.

Keberhasilan dalam rangka pengawasan Suplemen Kesehatan ditunjang pula oleh kemampuan pengujian dalam menguji mutu secara laboratorium. Kendala yang dialami pada pengujian suplemen kesehatan adalah belum tersedianya metode analisis untuk beberapa jenis sediaan seperti jelly/gummy, strip dan sediaan lepas lambat. Sehingga perlu dilakukan

pengembangan metode analisis untuk jenis sediaan tersebut, agar kedepan produk suplemen kesehatan tersebut dapat diawasi.

#### **A.1.6. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat**

**Tabel 10. Pencapaian Indikator Kinerja ke 6 pada Sasaran Kegiatan ke-1**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR (%)	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR
Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu	Persentase makanan yang memenuhi syarat	85,00%	88,39 %	103,99%	Memuaskan

Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2018 adalah 88,39% dengan capaian 103,99% dari target yang ditetapkan sebesar 85%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2019 (75%), maka capaian tahun 2018 adalah sebesar 117,97%. Capaian ini masuk dalam kategori memuaskan. Keberhasilan capaian target pada tahun 2018 ini antara lain disebabkan oleh:

1. Kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang melibatkan sekolah-sekolah, perguruan tinggi, Organisasi Masyarakat, Disperindag, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kelurahan, Kecamatan hingga Kabupaten, dengan total jumlah peserta 5284 orang.
2. Pembinaan pada pelaku usaha dalam rangka permohonan ijin produksi, berupa bimbingan teknis UMKM, penyederhanaan cek list untuk pemenuhan CPPB-IRT bagi UMKM, bantuan uji laboratorium untuk pendaftaran pangan pada UMKM, dan FGD fortifikasi para pelaku usaha garam.
3. Kegiatan bersama lintas sektor untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pangan aman, seperti Car Free Day dan Gerakan Nasional peduli Obat dan Makanan Aman (GN POPA)
4. Operasional Laboratorium Keliling dalam rangka pengawasan pangan, total kegiatan di 15 Desa, 23 Pasar dan 17 sentra takjil.
5. Bimbingan Teknis KIE Pangan Jajanan Anak Sekolah yang melibatkan 113 peserta lintas

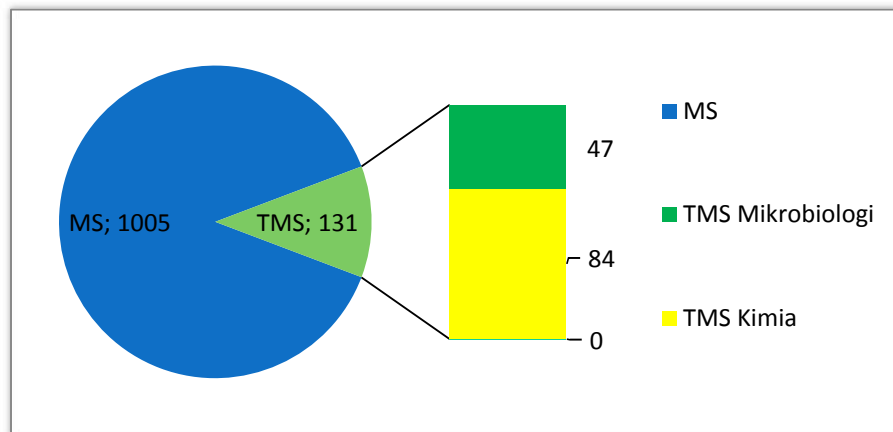
sektor, 98 peserta siswa sekolah dan perguruan tinggi, serta 356 peserta dari komunitas sekolah.

6. Pemusnahan terhadap produk pangan (TIE, kadaluarsa dan rusak) sejumlah 4387 buah dari 792 nama produk, senilai Rp 33.706.970.
7. Penerapan sanksi administrasi maupun *projusticia* pada sarana produksi dan distribusi yang melakukan pelanggaran di bidang makanan. Hal ini semakin meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha terhadap peraturan.

Penurunan target pada tahun 2019 (85% menjadi 75%) dikarenakan pada tahun 2018 evaluasi terhadap penandaan/label tidak diperhitungkan dalam sampel yang TMS. Sedangkan pada tahun 2019 evaluasi TMS label masuk dalam perhitungan, sehingga diperkirakan akan menambah jumlah sampel makanan yang TMS.

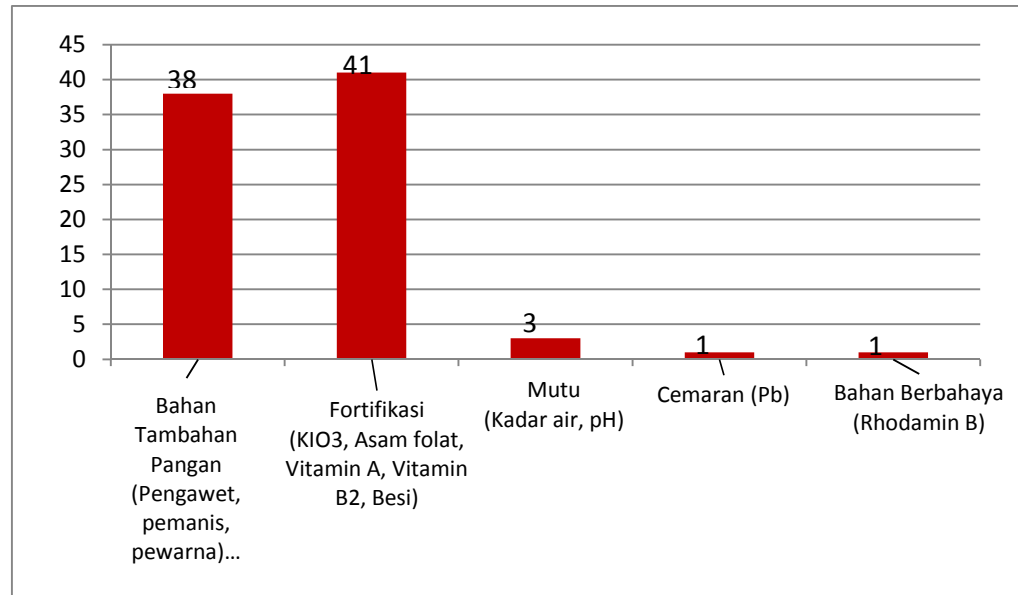
Agar target ditahun 2019 tercapai dibutuhkan intensifikasi pembinaan terhadap pelaku usaha yaitu produsen produk MD maupun PIRT dalam memenuhi persyaratan CPPOB, maupun distributor makanan untuk menjamin produk yang salurkan adalah produk yang aman, terdaftar, tidak kadaluarsa dan tidak rusak. Selain itu intensifikasi pengawasan penandaan dan pembinaan atau sosialisasi penandaan kepada industri makanan dan industri rumah tangga pangan perlu dilaksanakan.

Profil hasil pengujian makanan pada tahun 2018, terlihat pada Gambar 12 berikut :



Gambar 12. Profil Hasil Pengujian Makanan

Dari Gambar 12 di atas terlihat bahwa sebagian besar makanan yang TMS adalah pada uji secara Kimia (64,12%). Adapun profil parameter uji kimia yang TMS, terlihat pada Gambar 13 berikut:



Gambar 13. Profil parameter uji makanan TMS secara kimia

Apabila dibandingkan dengan target pada standar nasional yaitu 89,6%, maka capaian BBPOM Yogyakarta adalah 98,65%. Dan apabila dibandingkan dengan capaian dari BBPOM kluster 3 yaitu BBPOM Pontianak (91,22%), BBPOM Banjarmasin (93,27%), dan BBPOM Aceh (94,78%), maka capaian BBPOM di Yogyakarta paling baik.

Secara umum pencapaian 5 indikator, yaitu persentase obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika dan pangan yang memenuhi syarat ditunjang oleh kapasitas laboratorium yang memadai. Kapasitas laboratorium meliputi ketersediaan peralatan, reagensia, dan baku pembanding yang dipenuhi dari proses pengadaan yang dilakukan. Komponen kapasitas laboratorium yang tak kalah penting yaitu kompetensi penguji. Kompetensi penguji ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan. Sedangkan unjuk kerja laboratorium dibuktikan dari hasil uji profisiensi yang diikuti. Pada tahun 2018 Laboratorium BBPOM di Yogyakarta mengikuti 18 uji profisiensi yang 3 (tiga) diantaranya berasal dari luar negeri dengan hasil memuaskan (inlier).

Berdasarkan dari pencapaian 6 indikator pada sasaran kegiatan 1 di atas, maka dapat dihitung nilai pencapaian sarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikator-indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya, yaitu:

$$NPS1 = \frac{(2 \times 97,04\%) + (2 \times 97,52\%) + (2 \times 101,68\%) + (2 \times 106,42\%) + (2 \times 100,52\%) + (2 \times 103,21)}{12}$$

$$NPS1 = 101,07\%$$

Dari nilai pencapaian sasaran di atas dapat disimpulkan bahwa tahun 2018 BBPOM di Yogyakarta telah berhasil mewujudkan obat dan makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja

BBPOM di Yogyakarta. Namun demikian, BBPOM di Yogyakarta harus terus melakukan langkah terobosan dalam upaya optimalisasi perlindungan bagi masyarakat.

## A.2. PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN 2

**Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan**

**Tabel 11. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-2**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR (%)	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu obat dan makanan	Indeks kepatuhan pelaku usaha dibidang Obat dan Makanan	61	72,84	119,41	Memuaskan

Pada sasaran kegiatan ini terdapat satu indikator kinerja yaitu Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan. Kepatuhan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait Obat dan Makanan. Pelaku usaha obat dan makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau memperjualbelikan obat dan makanan.

Variabel penyusun indeks kepatuhan ini adalah :

1. Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP)
2. Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP)
3. Hasil pemeriksaan sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan
4. Indeks kepatuhan pelaku usaha dihitung menggunakan metodologi statistik dan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja.

Capaian indeks kepatuhan pelaku usaha di Yogyakarta sebesar 72,84 yang telah mencapai target dengan nilai capaian indikator 119,41% kriteria memuaskan. Indeks ini juga telah berada di atas Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Nasional dengan nilai 65,25. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Cakupan pemeriksaan 100% terhadap pemenuhan GMP
2. Bimbingan Teknis terhadap pelaku usaha
3. Dukungan lintas sektor

#### **A.2.1. Cakupan pemeriksaan 100% terhadap pemenuhan GMP**

Pemeriksaan sarana merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh BBPOM Yogyakarta. Selain untuk memeriksa pemenuhan terhadap kesesuaian GMP dan GDP juga sebagai langkah pembinaan agar pelaku usaha tetap berjalan pada koridor GMP dan GDP. Untuk sarana produksi yang ijin edar dikeluarkan Badan POM, pemeriksaan sarana bisa dilakukan rutin sehingga cakupan pemeriksaan per tahun 100 %. Data tahun 2018 sejumlah 90 sarana dengan nomor ijin dari Badan POM yaitu 1 industri farmasi, 32 UKOT/UMOT, 13 kosmetik, 44 pangan MD telah dikunjungi rutin tiap tahun sekali, sehingga kepatuhan pelaku usaha semakin baik.

#### **A.2.2. Bimbingan Teknis terhadap pelaku usaha**

Bimbingan teknis dilakukan terhadap sarana produksi dan distribusi di Yogyakarta dengan materi utama berupa penerapan Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik. Data bimtek kepada pelaku usaha adalah sebagai berikut :

1. Bimtek dan Pelayanan Prima Pendaftaran Pangan Olahan, 20 Maret 2018
2. Bimtek kepada pelaku usaha UMKM OT, 12 April 2018
3. Bimtek dan Pelayanan Prima Notifikasi Kosmetik, 23 Juli 2018
4. Bimtek dan Pelayanan Prima Pendaftaran OT-SK, 23-25 Juli 2018
5. Pelatihan Tenaga Pengelola Saryanfar, 7 – 8 November 2018

#### **A.2.3. Dukungan Lintas Sektor**

Perwujudan peningkatan kepatuhan pelaku usaha di bidang obat dan makanan aman tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya peran dari lintas sektor terkait. Hal ini juga didukung

dengan kewenangan pengawasan pangan industri Rumah Tangga yang berada di pundak Pemda Kabupaten/Kota. Di Yogyakarta, seluruh kabupaten/kota telah berkomitmen dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan yang tertuang dalam Kerjasama Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu antara Kepala Badan POM dengan Gubernur DIY beserta seluruh bupati/walikota se DIY pada tanggal 23 April 2014, dan telah dikuatkan dengan Instruksi Gubernur DIY nomor 1/INSTR/2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang ditetapkan pada tanggal 13 Maret 2018. Dengan Instruksi Gubernur tersebut diharapkan pengawasan akan lebih banyak sehingga berdampak pada ketaatan pelaku usaha yang semakin meningkat

**Tabel 12. Alokasi Anggaran Pelaksanaan Pengawasan Obat & Makanan Kab/Kota 2018**

No	Dinas Kab/Kota	Nama Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta	Bimtek Kefarmasian	38.625.000
		Pembinaan & Pengawasan P-IRT	58.812.000
		Penyuluhan Keamanan Pangan	218.880.000
		<i>Sub Total Kota Yogyakarta</i>	<u>316.317.000</u>
2.	Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo	Pengawasan dan Pemantauan Peredaran OMKABA	61.044.400
		<i>Sub Total Kab Kulonprogo</i>	<u>61.044.400</u>
3.	Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul	Pelatihan Keamanan Pangan (PKP) dan Sertifikasi P-IRT bagi sarana industry rumah tangga pangan	25.000.000
		Penyebaran informasi bahan berbahaya pada makanan, obat tradisional dan kosmetik	7.387.500
		Supervisi sarana distribusi makanan olahan rumah tangga	3.000.000
		<i>Sub Total Kab Gunungkidul</i>	<u>35.387.500</u>
4.	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	102.210.000
		Pelatihan Keamanan Pangan (PKP) dan Sertifikasi P-IRT bagi pelaku usaha	67.325.000
		<i>Sub Total Kab Bantul</i>	<u>169.535.000</u>

No	Dinas Kab/Kota	Nama Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
5.	Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	72.813.500
		Peningkatan pemberdayaan konsumen / masyarakat di bidang obat dan makanan	99.969.500
		Pelatihan Keamanan Pangan (PKP) dan Sertifikasi P-IRT bagi pelaku usaha	41.155.000
		<i>Sub Total Kab Sleman</i>	<u>213.938.000</u>
<b>Total Anggaran</b>			<b>796.221.900</b>

Berdasarkan Tabel 12 anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah daerah kab/kota untuk Obat dan Makanan baik dari segi pengawasan, pemberdayaan masyarakat maupun setifikasi, pada tahun 2018 sebesar Rp 796.221.900,- . Jumlah ini mengalami peningkatan dibanding anggaran tahun 2017 yang totalnya Rp. 524.621.000,-. Prosentase peningkatan sebanyak 52% menunjukkan bahwa komitmen Pemda telah diwujudkan dengan mengalokasikan anggaran yang lebih besar. Adanya Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan, telah mendorong Pemda Kab/Kota untuk lebih meningkatkan peran dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Apabila dibandingkan dengan capaian BBPOM dalam cluster 3 yaitu BBPOM Pontianak (93,65), BBPOM Banjarmasin (126,12%) dan BBPOM Aceh (96,93%), maka capaian BBPOM Yogyakarta paling baik.

### A.3. PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN 3

**Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman**

**Tabel 13. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-3**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR (%)	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR
<b>Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan</b>	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman.	61	65,92	108,07%	Memuaskan

Pada sasaran kegiatan ini terdapat satu indikator kinerja yaitu Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman adalah nilai indeks yang diperoleh dari hasil survei terhadap pelaksanaan KIE yang dilakukan UPT BPOM. Pengetahuan bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.

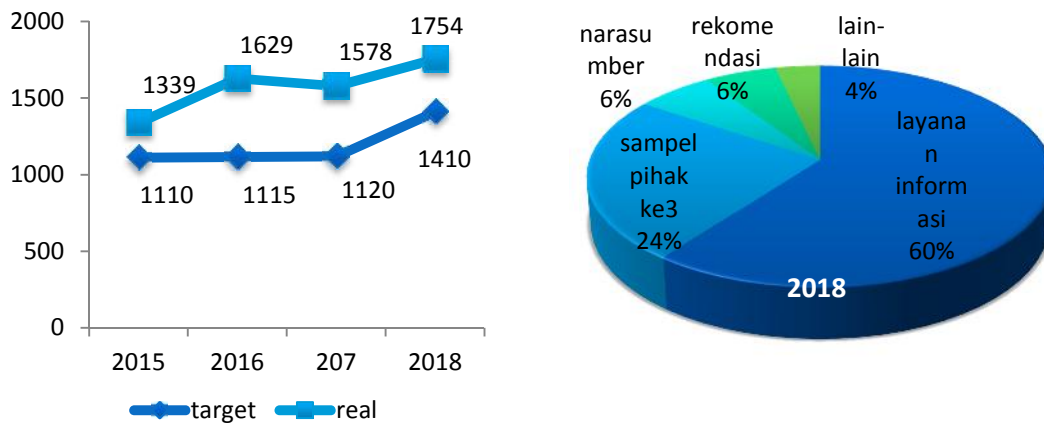
Berdasarkan hasil survei, Indeks pengetahuan masyarakat Yogyakarta sebesar 65,92 telah melebihi target, dengan capaian indikator sebesar 108,07% dalam kategori memuaskan. Indeks ini juga telah berada di atas rata-rata nasional 63,93 Target ini bisa tercapai karena dukungan kegiatan yang telah dilakukan berupa :

1. Pelayanan publik
2. Pemberdayaan kader
3. Pemberdayaan komunitas desa
4. Pemberdayaan komunitas pasar
5. Intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah

### **A.3.1. Pelayanan Publik**

Jumlah layanan publik tahun 2018 mencapai 1754 layanan, terdiri dari 1057 layanan informasi, 424 permintaan pengujian pihak ketiga, 109 permintaan sebagai nara sumber, 101 permohonan surat rekomendasi dan 63 lain-lain (berupa kegiatan talkshow, dialog interaktif, pameran, penyebaran informasi, iklan layanan masyarakat, layanan pengaduan).

Berdasarkan jumlah tersebut, kontribusi layanan publik di BBPOM Yogyakarta yang paling tinggi adalah layanan informasi disusul permintaan pengujian sampel pihak ketiga, dan permintaan sebagai nara sumber. Layanan informasi dan permintaan nara sumber yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat Yogyakarta membutuhkan peningkatan pengetahuan tentang obat dan makanan. Tidak hanya para pelaku usaha namun juga masyarakat desa maupun komunitas sekolah, pengajian, ibu PKK serta komunitas lain baik yang secara langsung datang ke BBPOM di Yogyakarta maupun yang mengundang sebagai nara sumber. Gambaran jumlah layanan publik oleh BBPOM di Yogyakarta dari tahun 2015-2018 pada Gambar 14



Gambar 14. Profil Layanan Publik Tahun 2015-2018

### A.3.2. Pemberdayaan Kader

Pembentukan kader diharapkan berfungsi sebagai kepanjangan tangan Badan POM yang ada tengah masyarakat, di tangan merekalah terjadi transfer ilmu untuk meningkatkan pengetahuan tentang obat dan makanan. Kader yang dilatih di tahun 2018 untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat adalah 45 orang kader desa, 3 orang kader pasar, dan 50 orang kader pramuka. Sedangkan total kader yang telah dilatih sejak tahun 2014 adalah 264 kader desa, 23 kader pasar, 120 kader pramuka.

Kader tersebut berfungsi sebagai fasilitator atau penggerak kegiatan di lingkup masyarakat dimana mereka tinggal atau bekerja. Semakin banyak kader yang bekerja akan semakin bertambah masyarakat yang terpapar pengetahuan tentang obat dan makanan. Beberapa hambatan yang masih terjadi adalah kader tidak aktif melakukan sosialisasi karena sakit, meninggal, pindah, maupun karena alasan keluarga.

### A.3.3. Pemberdayaan Komunitas Desa

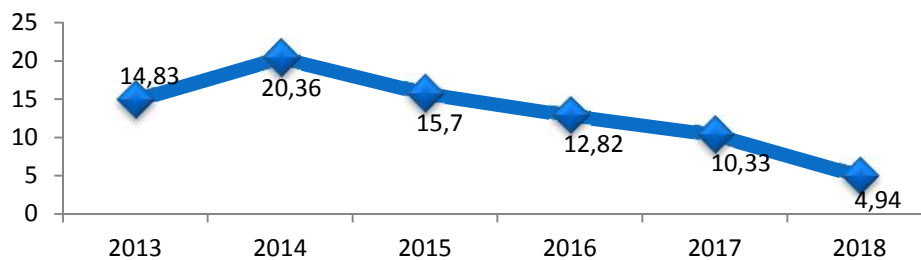
Pemberdayaan komunitas desa dimulai sejak dimulai sejak tahun 2014 dengan nama awal Food Safety Masuk Desa, kemudian diperbaharui menjadi Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD). Jumlah desa yang telah diintervensi sebanyak 26 desa/kelurahan, terdiri dari 23 desa/kelurahan lama dan 3 desa baru di tahun 2018.

Masing-masing desa/kelurahan melakukan pemberdayaan terhadap komunitas yang terdiri dari IRTP, ibu PKK, PKL, Retail dan Sekolah. Jika dihitung dari sejak awal program GKPD berjalan di tahun 2014, pemberdayaan ini telah menysasar pada 1440 orang dari berbagai macam komunitas,

jumlah ini masih ditambah dengan kegiatan mandiri pasca intervensi yang juga telah menghasilkan ratusan komunitas baru. Dengan semakin bertambahnya jumlah komunitas yang diberdayakan, merupakan salah satu indikator semakin meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman.

#### A.3.4. Pemberdayaan Komunitas Pasar

Target tahun 2018 sebanyak 8 pasar terdiri dari 7 pasar lama dan 1 pasar baru. Pemberdayaan komunitas pasar dalam bentuk sosialisasi melalui berbagai kegiatan antara lain penyuluhan terhadap pedagang, sampling-uji produk yang dijual, kampanye pasar dan pameran bagi pedagang dan pengunjung pasar. Kegiatan ini selain bertujuan untuk menurunkan prosentase pangan mengandung bahan berbahaya juga untuk memberikan pengetahuan kepada pedagang dan pembeli tentang keamanan pangan.



Gambar 15.: Persentase sampel TMS thn 2013 – 2018

Gambar 15 menunjukkan bahwa sejak tahun 2013 sebagai tahap awal intervensi komunitas pasar, telah terjadi penurunan peredaran produk pangan mengandung bahan berbahaya, yang berarti tingkat pengetahuan para pedagang telah semakin baik.

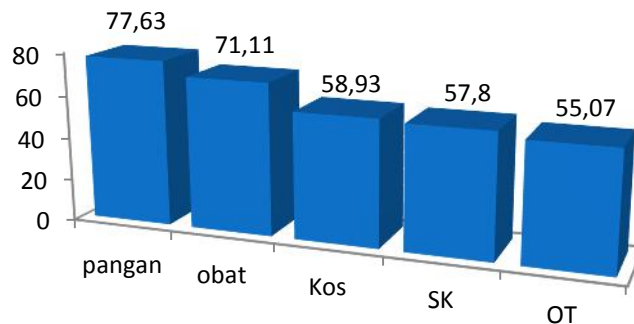
#### A.3.5. Intervensi keamanan PJAS

Beberapa tahapan kegiatan intervensi adalah Pertemuan Lintas Sektor, Bimtek Keamanan Pangan Kantin Sekolah, Intensifikasi dan Intervensi Keamanan PJAS serta Monitoring – Evaluasi. Tahapan bimtek dilakukan terhadap 98 sekolah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan sasaran komunitas sekolah baik itu guru, murid, orang tua dan pengelola kantin sekolah. *Goal* yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah diraihnya sertifikat Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah (PBKPKS) oleh sekolah, yang berarti praktek Keamanan Pangan akan berjalan dengan baik melalui kantin sekolah. Target sekolah yang mendapat PBKPKS sebanyak 10 sekolah

dan telah terealisasi 100%. Untuk tahun selanjutnya, kegiatan intervensi PJAS hanya berupa pengawalan terhadap 98 sekolah yang telah terpilih.

Apabila dibandingkan dengan dengan capaian BBPOM yang sekluster yaitu BBPOM Pontianak (119,44%), BBPOM Banjarmasin (92,05%) dan BBPOM Aceh (99,83%), maka capaian BBPOM Yogyakarta sama dengan BBPOM Pontianak (lebih baik daripada BBPOM Banjarmasin dan Aceh).

Sebaran indeks pengetahuan obat dan makanan berdasarkan komoditi di Daerah Istimewa Yogyakarta seperti diperlihatkan pada Gambar 16.



Gambar 16. Indeks pengetahuan masyarakat per komoditi

Indeks tertinggi pengetahuan masyarakat pada komoditi pangan, hal ini karena beberapa program wajib pemberdayaan masyarakat dari Badan POM lebih mengarah ke pangan antara lain GKPD, pasar dan PJAS.

Berdasarkan nilai indeks tersebut di atas maka direncanakan untuk tahun selanjutnya, kegiatan KIE dan pemberdayaan masyarakat akan lebih ditekankan pada komoditi OT, SK dan Kosmetik. Untuk tahun 2018 telah mulai dilakukan KIE kosmetik dengan peserta generasi millennial dari perguruan tinggi dan SMA di Yogyakarta dengan tema Cerdas Menggunakan Kosmetik pada tanggal 15 Desember 2018 dengan narasumber dari Badan POM, dokter kulit dan KPID selaku pengawas iklan di media massa.

**A.4. PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN 4**  
**Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis Resiko**

Indikator kinerja untuk sasaran kegiatan ini ada lima (5) indikator, yaitu:

1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar.
2. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
3. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan
4. Persentase kepatuhan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
5. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan

Pencapaian indikator kinerja kegiatan Sasaran Kegiatan 4 seperti dalam 14 berikut :

**Tabel 14. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-4**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	NILAI CAPAIAN INDIKATOR (%)	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100 %	100 %	100 %	Baik
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	24,00	23,32 %	97,17 %	Cukup
	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	65,00 %	78,85 %	121,30 %	Memuaskan
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,00 %	98,02 %	103,18%	Memuaskan
	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan	55,00 %	59,29 %	107,81%	Memuaskan

#### A.4.1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar

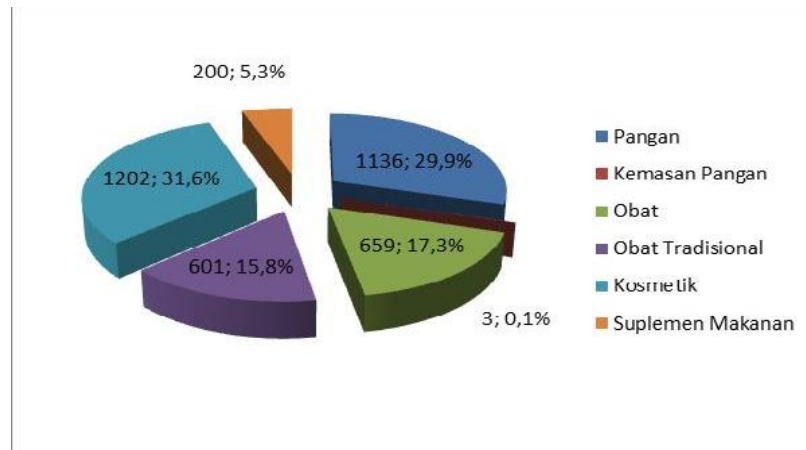
Tabel 15. Pencapaian Indikator Kinerja ke 1 pada Sasaran Kegiatan ke-4

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	NILAI CAPAIAN INDIKATOR (%)	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100%	100%	100%	Baik

Standar merupakan pedoman sampling dan pengujian obat dan makanan. Pemenuhan pengujian adalah sampel yang diuji dengan parameter uji kritis (wajib) yang tercantum dalam standar terhadap sampel yang harus diuji.

Parameter uji kritis adalah parameter uji yang ditetapkan berdasarkan kajian risiko mutu dan keamanan yang dapat berpengaruh langsung pada kesehatan dengan mempertimbangkan bentuk sediaan dan sifat kimia fisika zat aktif. Parameter uji kritis telah ditetapkan dalam Pedoman Sampling Obat dan Makanan tahun anggaran 2018.

Realisasi pengujian sesuai standar pada tahun 2018 adalah 100%, ini berarti semua sampel telah diuji menggunakan parameter uji kritis sesuai yang telah ditetapkan. Capaian ini harus senantiasa dipertahankan sehingga kesimpulan hasil uji tidak bias dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahun 2018 telah diuji sebanyak 3803 sampel sesuai dengan yang ditargetkan dalam DIPA. Realisasi jumlah sampel perkomoditi dapat dilihat pada Gambar 17 berikut:



Gambar 17. Realisasi jumlah sampel perkomoditi

Keberhasilan pemenuhan uji sesuai standar ini didukung dengan dilakukannya pemantauan dan monitoring secara berkala terhadap rencana sampling yang masuk terutama pada aspek ketersediaan reagensia, baku pembanding, dan peralatan yang dikomunikasikan dengan baik kepada petugas sampling maupun sebaliknya. Komunikasi tentang perubahan rencana sampling dilakukan menggunakan memo dinas dari kepala bidang pengujian kepada kepala bidang pemeriksaan.

Disamping itu kegiatan pengadaan peralatan baru, pengadaan suku cadang, perawatan dan kalibrasi peralatan serta pengadaan reagensia dan media mikrobiologi merupakan faktor utama pendukung terpenuhinya pengujian sesuai standar tersebut.

Apabila dibandingkan dengan capaian dari BBPOM cluster 3 yaitu BBPOM Pontianak (100%), BBPOM Banjarmasin (96,19%) dan BBPOM Aceh (108,97%), maka capaian BBPOM di Yogyakarta sama dengan BBPOM Pontianak.

#### A.4.2. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

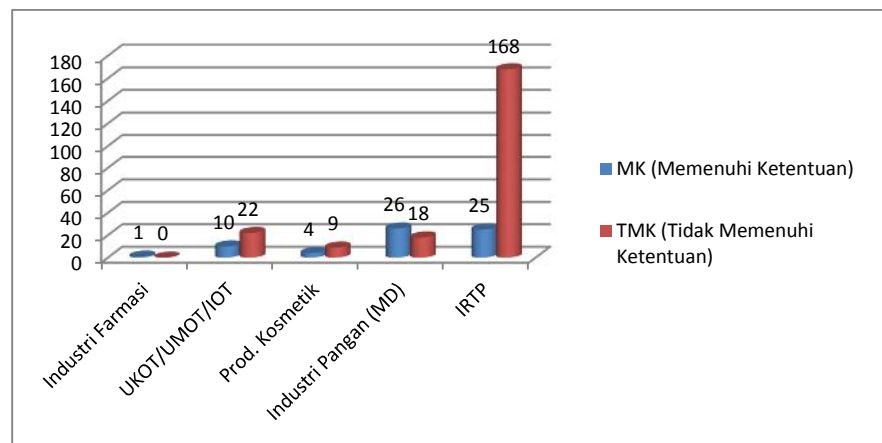
Tabel 16. Pencapaian Indikator Kinerja ke 2 pada Sasaran Kegiatan ke-4

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	NILAI CAPAIAN INDIKATOR (%)	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	24,00	23,32 %	97,17 %	Cukup

Yang termasuk dalam kategori sarana produksi Obat dan Makanan adalah sarana produksi obat (industri farmasi); sarana produksi obat tradisional yang mencakup IOT, UKOT dan UMOT; Sarana produksi kosmetik yang mencakup industri kosmetik golongan A dan B; Sarana Produksi Suplemen Kesehatan dan Sarana Produksi pangan.

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi kriteria (MK) tahun 2018 adalah 23,32%, apabila dibandingkan dengan target 2018 (24%), maka capaiannya adalah 97,17% dengan kriteria cukup

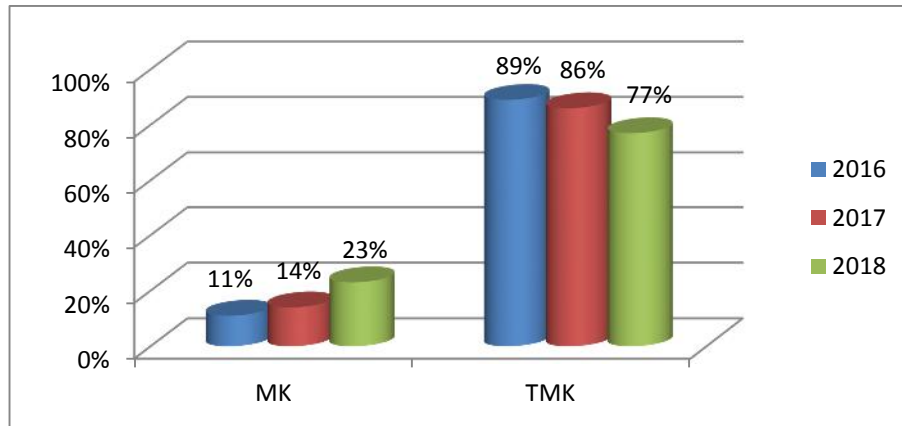
Profil sarana produksi yang memenuhi kriteria per komoditas terlihat pada Gambar 18 berikut :



Gambar 18. Profil sarana produksi yang memenuhi ketentuan

Dari Gambar 18 diatas tampak bahwa sarana yang jumlahnya paling banyak adalah IRTP dengan hasil pemeriksaan juga masuk kategori tidak memenuhi kriteria (TMK) paling banyak. Oleh karena itu diperlukan pendekatan yang lebih efektif dalam pembinaan sehingga pelaku usaha IRTP mau mengikuti CPPB-IRT sebagaimana seharusnya.

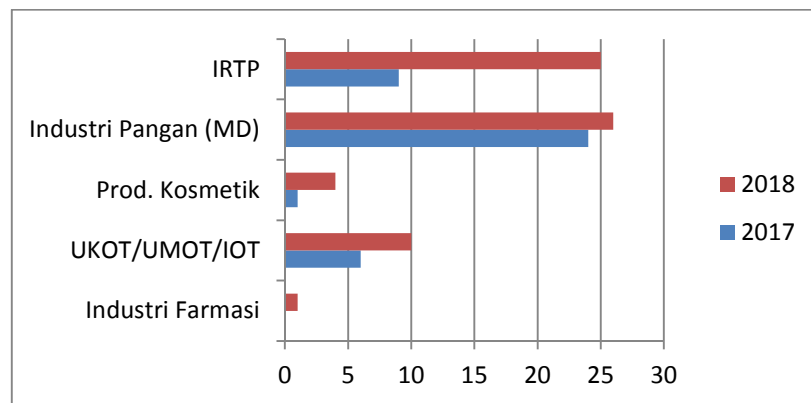
Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya maka profil sarana produksi yang memenuhi kriteria dan tidak memenuhi kriteria terlihat dalam Gambar 19 berikut:



Gambar 19. Hasil Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan Tahun 2016-2018

Dari Gambar 19 tersebut di atas terlihat bahwa hasil pemeriksaan sarana produksi obat dan makanan selama kurun waktu 3 tahun masih menunjukkan tingginya persentase hasil pemeriksaan dengan hasil TMK, namun telah terjadi kenaikan prosentase sarana MK selama 3 tahun terakhir, hal ini dapat diartikan bahwa kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi peraturan telah ada peningkatan, meskipun masih kecil.

Peningkatan hasil pemeriksaan sarana produksi menjadi MK terjadi di semua sarana produksi, seperti terlihat pada Gambar 20 berikut :



Gambar 20. Peningkatan hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan MK

Dari grafik tersebut diatas menunjukkan ada keberhasilan pembinaan yang dilakukan kepada pelaku usaha sehingga tumbuh kesadaran dari pelaku usaha untuk menerapkan aspek-aspek produksi baik CPOB, CPKB, CPOTB, CPPOB, CPPB-IRT lebih meningkat.

Upaya pembinaan yang telah dilakukan oleh BBPOM diYogyakarta pada tahun 2018, antara lain:

1. Bimtek Pangan dengan materi Perkembangan produk pangan & jenis pangan olahan baru serta prosedur pengkajian, yang diikuti oleh 45 peserta dari Lintas sektor (Dinas Kesehatan di DIY), dan pelaku usaha pangan
2. Bimtek Kemandirian pelaku usaha & pemenuhan standar mutu dan keamanan Obat Tradisional, dengan materi penerapan aspek CPOTB di UKOT & UMOT, yang diikuti oleh 42 peserta dari Apoteker penanggungjawab UKOT dan GP Jamu di DIY
3. Bimtek Kemandirian pelaku usaha & pemenuhan standar mutu dan keamanan Pangan, dengan materi Regulasi pangan olahan, pedoman SPP-IRT, prosedur pendaftaran pangan olahan, yang diikuti oleh 23 peserta pelaku usaha pangan di DIY
4. Self Assesment Kemandirian Industri Farmasi, yang dilaksanakan oleh petugas Badan POM dan BBPOM Yogyakarta

Jika realisasi capaian tahun 2018 dibandingkan dengan target tahun 2019 (30%), maka nilai capaian pengawasan sarana produksi yang memenuhi ketentuan tahun 2018 sebesar 77,73%. Agar target tahun 2019 dapat tercapai diperlukan strategi yang tepat antara lain dengan melakukan perbaikan jangka pendek dengan desk CAPA dan monitoring perbaikan terhadap temuan pada pemeriksaan sebelumnya, dan perbaikan jangka panjang dengan bimbingan teknis penerapan GMP yang berkesinambungan, serta pendekatan-pendekatan yang lebih baik untuk memotivasi pelaku usaha agar menerapkan aspek-aspek GMP secara konsisten.

Apabila dibandingkan dengan capaian dari BBPOM cluster 3 yaitu BBPOM Pontianak (21,80%), BBPOM Banjarmasin (129,92%) dan BBPOM Aceh (148,26%), maka pencapaian BBPOM di Yogyakarta lebih baik dari pada ke tiga BBPOM diatas karena BBPOM Pontianak kategori kurang, sedangkan BBPOM Banjarmasin dan Aceh tidak dapat disimpulkan.

#### A.4.3. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan

Tabel 17. Pencapaian Indikator Kinerja ke 3 pada Sasaran Kegiatan ke-4

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	NILAI CAPAIAN INDIKATOR (%)	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	65,00 %	78,85 %	121,30 %	Memuaskan

Sarana distribusi Obat yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat (PBF dan instalasi farmasi kabupaten/kota) dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi rumah sakit, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Pengawasan di sarana distribusi obat dilakukan untuk memastikan bahwa pihak pemilik sarana telah menerapkan Cara Distribusi Obat Yang Baik sehingga diharapkan produk obat yang didistribusikan memenuhi persyaratan, terjamin mutu dan keamanannya

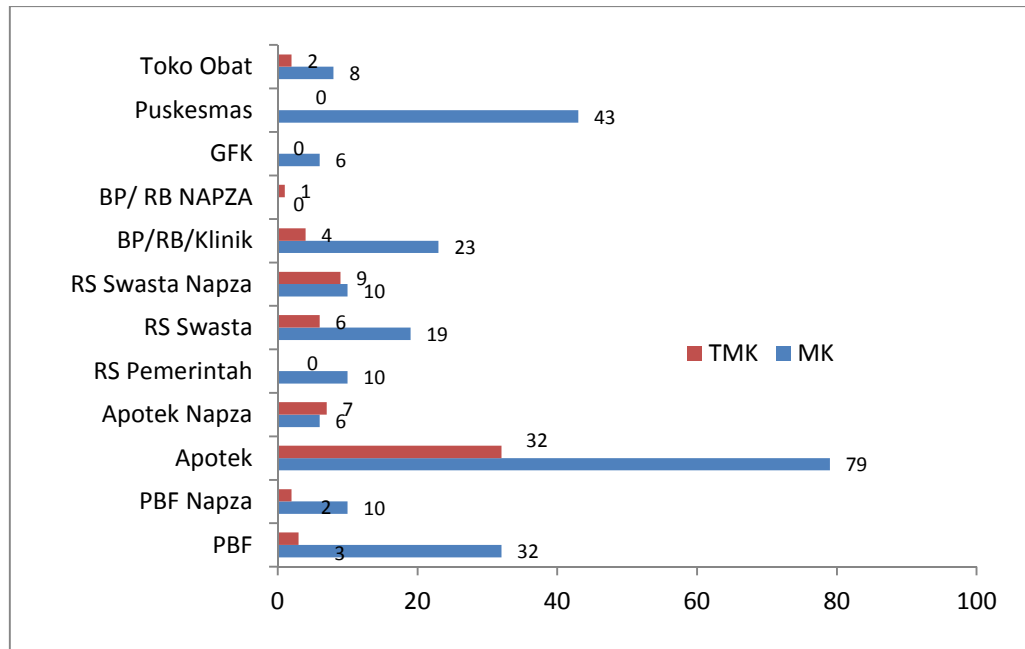
Pada tahun 2018 telah diperiksa 312 sarana distribusi obat dengan hasil sarana MK 78,85%, hasil ini telah melebihi target tahun 2018 yaitu 65%, atau nilai capaiannya 121,30% dengan kategori memuaskan. Kepada sarana distribusi Obat yang TMK (21,15%) telah diberikan tindak lanjut berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan, dan rekomendasi pencabutan izin.

Keberhasilan pencapaian target pemeriksaan sarana distribusi obat tahun 2018, antara lain disebabkan oleh:

1. Peningkatan kompetensi pengelola obat di Saryanfar, yang dilakukan selama 2 hari dengan peserta Apoteker pengelola Saryanfar
2. Perkuatan pengawasan dan tindak lanjut Obat, yang diikuti oleh Pimpinan / penanggungjawab PBF
3. Peningkatan Kompetensi Petugas pengawas BBPOM di Yogyakarta dengan pelatihan Cara Distribusi Obat Yang Baik, yang dilaksanakan di Badan POM Pusat

Jumlah sarana distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian (Saryanfar) di wilayah Yogyakarta sebanyak 885 sarana, dan telah diperiksa sebanyak 312 sarana, sehingga persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian (Saryanfar) tahun

2018 sebesar 35,25%. Pemilihan sarana yang diawasi berdasarkan kajian risiko terhadap sarana distribusi tsb.



Gambar 21. Profil hasil pemeriksaan pada sarana distribusi Obat

Dari Gambar 21, hasil pemeriksaan TMK terbanyak adalah pada sarana apotek, yaitu 32 dari total 111 sarana yang diperiksa (28,83%), oleh karena itu diperlukan peningkatan pembinaan baik melalui desk CAPA maupun pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pengelola obat disarana pelayanan, sehingga sarana distribusi mampu memenuhi pengelolaan obat sesuai CDOB yang berlaku.

Apabila dibandingkan dengan capaian dari BBPOM cluster 3 yaitu BBPOM Pontianak (108,52%), BBPOM Banjarmasin (106,40%) dan BBPOM Aceh (107,84%), maka capaian keempat balai tersebut sama yaitu memuaskan.

**A.4.4. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu**

**Tabel 18. Pencapaian Indikator Kinerja ke 4 pada Kegiatan Sasaran Strategis ke-4**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	NILAI CAPAIAN INDIKATOR (%)	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95 %	98,02 %	103,18%	Memuaskan

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup Surat hasil pemeriksaan / Surat rekomendasi/Surat pemberhentian proses penilaian sarana produksi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan dalam pendaftaran produk, pemeriksaan PBF dalam rangka sertifikasi CDOB, penerbitan SKI/SKE obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan.

Dalam melakukan kegiatan sertifikasi tersebut terdapat *timeline* yang harus diperhatikan. Pada tahun 2018, sebanyak 98,02% penilaian sertifikasi telah dilakukan tepat waktu, hasil ini telah mencapai target sasaran kinerja tahun 2018 yaitu 95%, dan jika dibandingkan dengan target tahun 2019 (96%) maka capaian tahun 2018 telah 100% tercapai.

Keberhasilan pencapaian target pemenuhan penilaian sertifikasi dikarenakan antara lain :

- Sudah dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dan telah diterapkan secara konsisten.
- Terjalin komunikasi yang baik dengan para pemohon sertifikasi, sehingga kooperatif dalam memberikan *feedback* tindakan perbaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan.
- Dan kegiatan peningkatan kompetensi untuk petugas BBPOM di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Badan POM, antara lain: In House training penilaian pangan olahan, dan Pelatihan Tim penilai keamanan pangan .

Apabila dibandingkan dengan capaian dari BBPOM cluster 3 yaitu BBPOM Pontianak (102,56%), BBPOM Banjarmasin (104,16%) dan BBPOM Aceh (63,41%), maka capaian BBPOM Yogyakarta sama dengan BBPOM Pontianak dan Banjarmasin yaitu memuaskan.

**A.4.5. Rasio Tindak Lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan**

**Tabel 19. Pencapaian Indikator Kinerja ke 5 pada Kegiatan Sasaran Strategis ke-4**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	NILAI CAPAIAN INDIKATOR (%)	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan	55,00 %	59,29 %	107,81%	Memuaskan

Dari hasil pemeriksaan sarana produksi / distribusi obat dan makanan yang TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan), dan Pengawasan produk diperedaran (sampling, iklan, penandaan label) yang TMK, BBPOM di Yogyakarta telah melakukan tindak lanjut berupa sanksi peringatan/peringatan keras/penghentian sementara kegiatan langsung ke pelaku usaha dan tindak lanjut berupa rekomendasi kepada instansi terkait.

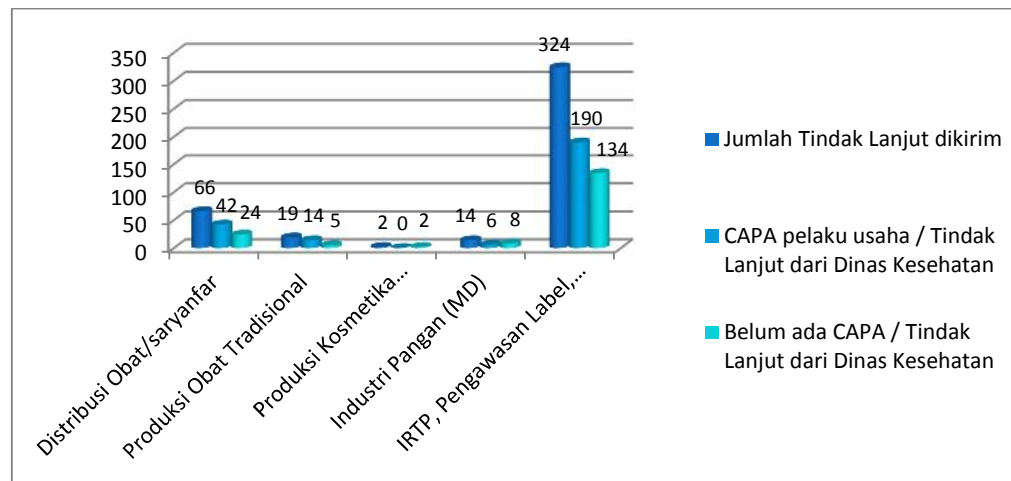
Pada tahun 2018 dari tindak lanjut yang diterbitkan, 59,29% telah ditindaklanjuti oleh Instansi terkait / pelaku usaha. Hasil ini telah mencapai target renstra BBPOM di Yogyakarta yang menargetkan 55%, sehingga capainnya sebesar 107,81% dengan kategori memuaskan. Dan jika dibandingkan dengan dengan target tahun 2019 (60%), maka capaian tahun 2018 telah mendekati target.

Tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi Obat Tradisional, pangan (MD) dan sarana pelayanan obat dilakukan dengan cara pelaku usaha mengirimkan CAPA (*Corrective action, Preventif action*) dengan melampirkan bukti perbaikan yang dilakukan. Sedangkan untuk pengawasan sarana IRTP, sampel pangan lokal, label dan iklan rekomendasi di tindak lanjuti oleh Dinas kesehatan Kabupaten/Kota. Keberhasilan pencapaian target ini juga didukung oleh adanya koordinasi yang baik dengan lintas sektor / pelaku usaha. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan lintas sektor/pelaku usaha adalah sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan Dinas Kesehatan di DIY tentang dengan pemaparan Pedoman pemberian sertifikat PIRT berdasar peraturan IRTP yang baru (Peraturan Badan POM No. 22 Tahun 2018)

2. Sosialisasi peraturan terkait Obat dan Makanan (Sosialisasi permendagri No. 41 Tahun 2018), yang diikuti oleh Lintas Sektor / dinas – dinas terkait di DIY
3. Forum evaluasi hasil pengawasan farmasi makanan, yang diikuti oleh lintas sektor (Dinas kesehatan, Disperindag, Akademi, Profesi, PKK, dll)
4. Desk CAPA Saryanfar Obat
5. Desk CAPA sarana Distribusi Obat (PBF)
6. Desk CAPA Industri Obat: PT. Berlico
7. Desk CAPA Obat Tradisional: UKOT

Adapun profil tindak lanjut pengawasan terlihat seperti dalam Gambar 22 berikut



Gambar 22. Tindak lanjut pengawasan di BBPOM Yogyakarta

Apabila dibandingkan dengan target pada standar nasional yaitu 36,1%, maka capaian BBPOM di Yogyakarta sudah melebihi pencapaian nasional. Dan apabila dibandingkan dengan capaian dari BBPOM cluster 3 yaitu BBPOM Pontianak (130,58%), BBPOM Banjarmasin (40,94%), dan BBPOM Aceh (100%), maka capaian BBPOM di Yogyakarta paling baik.

Berdasarkan dari pencapaian 5 indikator pada sasaran strategis di atas, maka dapat dihitung nilai pencapaian sarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikator-indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya, yaitu:

$$NPS1 = \frac{(2 \times 100\%) + (2 \times 97,17\%) + (2 \times 121,30\%) + (2 \times 103,18\%) + (2 \times 107,81\%)}{10}$$

$$NPS1 = 105,89\%$$

Dari nilai pencapaian sasaran di atas dapat disimpulkan bahwa tahun 2018 BBPOM di Yogyakarta telah berhasil meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta.

**A.5. PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN 5**  
**Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan**

**Tabel 20. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-5**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	NILAI CAPAIAN INDIKATOR (%)	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR
Menguatnya penegakan hukum dibidang Obat dan Makanan	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	50%	53,80 %	107,00%	Memuaskan

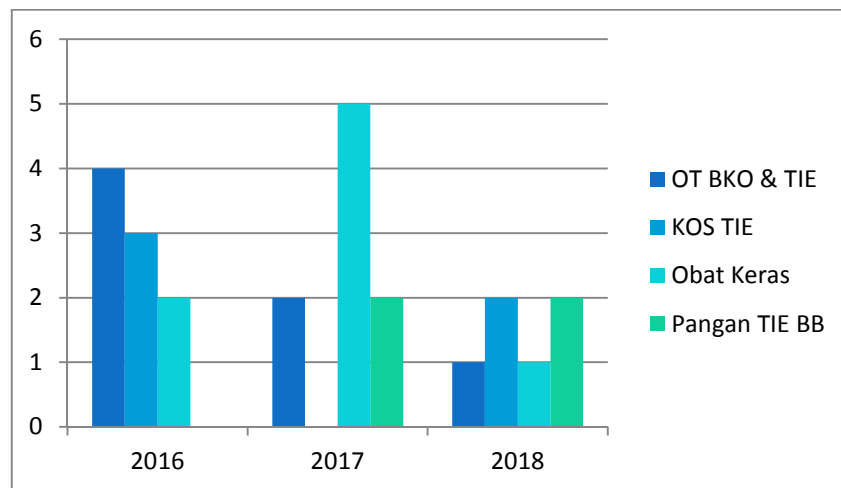
Pada Sasaran kegiatan menguatnya penegakan hukum di bidang obat dan makanan terdapat satu indikator kinerja yaitu Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II. Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara projustisia berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan tahap II adalah perkara yang telah diselesaikan hingga penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum.

Realisasi persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II tahun 2018 adalah 53,80% dan nilai capaian indikator diperoleh 107,00% dengan kriteria memuaskan.

Persentase ini berasal dari 4 perkara 2018 ( dari 6 perkara yang ada) yang sampai pada tahap II ditambah 3 perkara tahun 2017 yang masuk tahap II di tahun 2018 dibagi 13 target perkara (10 target 2018+ 3 perkara lanjutan tahun 2017). Ketujuh perkara yang dapat diselesaikan hingga tahap II adalah 2 kasus Obat daftar G dan TIE, 1 kasus Obat tradisional TIE dan mengandung BKO, 2 kasus pangan TIE serta 2 kasus pangan yang mengandung bahan berbahaya.

Dari 7 perkara tersebut telah mendapat putusan pengadilan dengan vonis pidana penjara antara 1 hingga 5 bulan dan denda antara 2 hingga 60 juta rupiah. Taksiran nilai ekonomi dari 7 perkara tersebut adalah Rp.534.365.660,-.

Keberhasilan pengungkapan perkara didukung oleh SDM yang kompeten, solidnya kerjasama tim dalam melakukan serangkaian kegiatan, mulai dari pengumpulan bahan keterangan sampai dilakukannya penindakan, serta kerjasama yang baik dengan lintas sektor terutama aparat penegak hukum, yaitu korwas PPNS dan kejaksaan. Partisipasi masyarakat juga sangat berperan dalam memberikan informasi awal karena kepercayaan masyarakat terhadap BBPOM di Yogyakarta sangat tinggi sehingga beberapa kasus pelanggaran di bidang obat dan makanan bersumber dari masyarakat. Profil perkara dari tahun 2015-2018 terlihat pada Gambar 23.



Gambar 23. Profil Perkara Tahun 2015-2018

Apabila dibandingkan dengan capaian dari BBPOM cluster 3 yaitu BBPOM Pontianak (163,64%), BBPOM Banjarmasin (180%), dan BBPOM Aceh (118,18%), maka capaian BBPOM di Yogyakarta sama dengan BBPOM Aceh yaitu kategori memuaskan.

**A.6. PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN 6**  
**Terwujudnya Reformasi Birokrasi BBPOM di Yogyakarta sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015 – 2019**

Sasaran Kegiatan ke-6 diukur dengan satu indikator kinerja yaitu Nilai AKIP BBPOM di Yogyakarta. Nilai AKIP diukur berdasarkan hasil penilaian AKIP yang dilakukan oleh APIP Badan POM. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu area perubahan reformasi birokrasi yang dimaksudkan untuk mengukur akuntabilitas kinerja dan peningkatan kinerja dari instansi pemerintah, yang meliputi perencanaan strategis, pelaksanaan dan

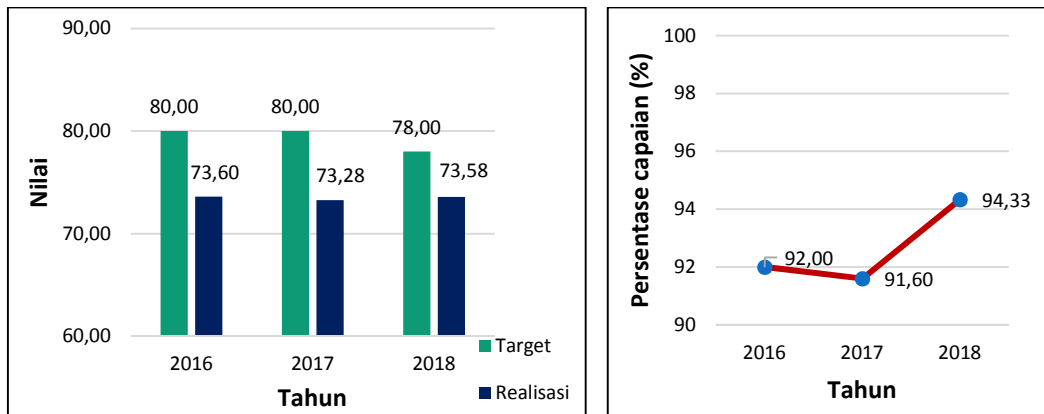
monitoring. Dengan menerapkan SAKIP, instansi pemerintah akan mampu mendeteksi dan memperbaiki kekurangan dalam pencapaian kinerja internal.

**Tabel 21. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-6**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR (%)	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR
Terwujudnya RB BBPOM di Yogyakarta sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP BBPOM di Yogyakarta	78	73,58	94,33	CUKUP

Penilaian SAKIP BBPOM di Yogyakarta oleh Inspektorat Badan POM dengan mendapatkan nilai 73,58 dari target tahun 2018 adalah 78, sehingga capaian indikatornya sebesar 94,33%.

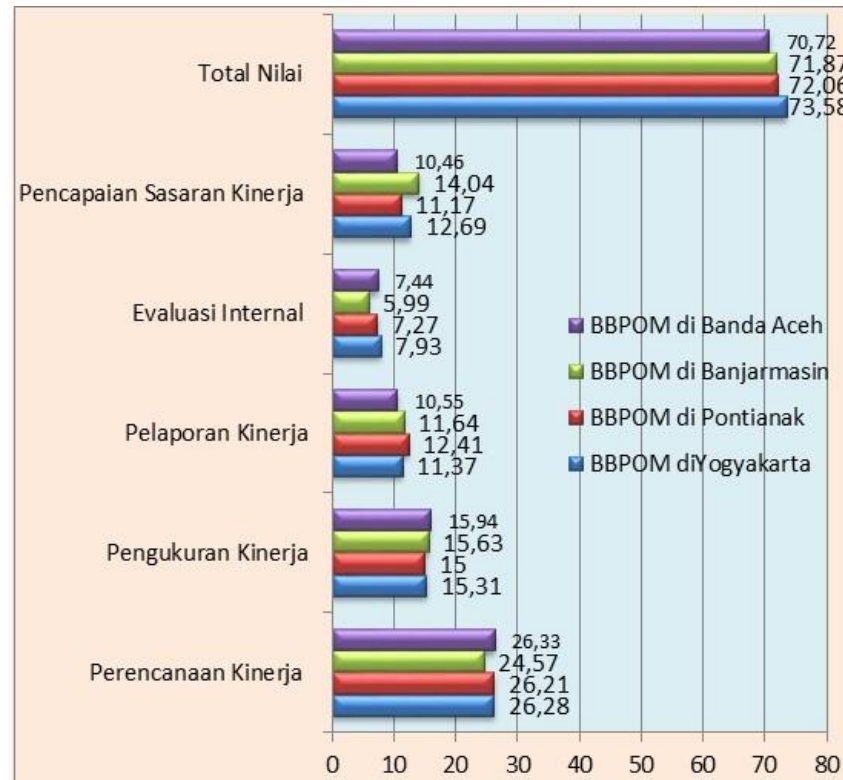
Capaian dari tahun 2016 sampai dengan 2018 dapat digambarkan melalui Gambar 24. Capaian pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini karena terjadi penurunan target dari A (diatas 81) menjadi 78 karena menyesuaikan dengan Target Badan POM dan hasil penilaian KEMENPANRB.



*Gambar 24. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Tahun 2016, 2017 dan 2018*

Sedangkan target capaian tahun 2019 yang merupakan target akhir periode Rencana Strategis adalah 81, sehingga perlu dilakukan perbaikan terus menerus dalam berbagai hal terkait sistem akuntabilitas kinerja.

Apabila dibandingkan dengan BBPOM lain yang memiliki jumlah sarana dan tantangan pengawasan sebanding, yaitu BBPOM di Pontianak, BBPOM di Banjarmasin dan BBPOM di Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 25.



Gambar 25. Perbandingan Nilai Evaluasi SAKIP

Total penilaian SAKIP dari keempat BBPOM tersebut yang tertinggi adalah BBPOM di Yogyakarta. BBPOM di Yogyakarta unggul pada aspek Evaluasi Internal sedang BBPOM di Banda Aceh lebih tinggi pada aspek Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja, BBPOM di Pontianak nilai Pelaporan Kinerja lebih tinggi, sedangkan Pencapaian Sasaran Kinerja yang lebih tinggi nilainya adalah BBPOM di Banjarmasin.

Peningkatan kualitas kapasitas kelembagaan yang telah dilakukan BBPOM POM di Yogyakarta, antara lain :

1. Penandatanganan MoU Kepala Badan POM bersama Gubernur DIY di bidang Pengawasan Obat dan Makanan
2. Pembentukan Satgas pemberantasan obat dan makanan ilegal sebagai tindak lanjut dari Inpres No. 3 tahun 2017 dengan SK Gubernur DIY Nomor 257/KEP/2017 tanggal 30 November 2017.
3. Penandatanganan kesepakatan bersama dengan 33 lintas sektor terkait pengawasan dan KIE obat dan makanan.

4. Pengendalian proses kegiatan sebagai salah satu bentuk reformasi birokrasi yang dimotori oleh Satgas SPIP.
5. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dengan membentuk Tim Zona Integritas yang bertugas membuat rencana kerja, melaksanakan dan monitoring semua rencana kerja Pembangunan Zona Integritas.
6. Melakukan "Deklarasi Kebulatan Tekad Gerakan Nasional Revolusi Mental" dan Penandatanganan "Komitmen Pegawai BBPOM di Yogyakarta membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)" sebagai bentuk komitmen pimpinan dan seluruh staf.
7. Penandatanganan komitmen antigratifikasi dan saber pungli antara Kepala BBPOM di Yogyakarta dengan pelaku usaha.
8. Digunakannya aplikasi e-performance, monev DJA, monev Bapenas dan Monev Tepra untuk menginput data target dan realisasi kinerja maupun anggaran setiap bulan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan, sehingga dapat dilakukan evaluasi terhadap capaiannya
9. Untuk menunjang penerapan Reformasi Birokrasi, BBPOM di Yogyakarta telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu secara konsisten yaitu :
  - QMS ISO 9001:2015 Audit Resertifikasi QMS ISO 9001:2015 oleh PT. TUV SUD Indonesia dilaksanakan pada tanggal 22–23 Oktober 2018 dengan hasil audit bahwa BBPOM di Yogyakarta dapat meraih sertifikat QMS ISO 9001:2015
  - ISO/IEC 17025:2017 Reakreditasi ke-4 sesuai persyaratan ISO/IEC 17025:2017 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada tanggal 5-6 November 2018
10. Melakukan Review Renstra terhadap target 2018 dan 2019 berdasarkan tren tahun sebelumnya dan SOTK baru

Perlu adanya langkah terobosan dalam upaya peningkatan kualitas kelembagaan selain beberapa hal diatas untuk mencapai target Nilai AKIP BBPOM di Yogyakarta pada Sasaran Kinerja "Terwujudnya RB BBPOM di Yogyakarta sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019" yang pada akhir periode Renstra Tahun 2019 dengan target sebesar 81. Langkah yang dapat dilakukan dan dapat meningkatkan nilai SAKIP diantaranya :

1. Melakukan review setiap indikator di Rencana Strategis setiap tahun terhadap realisasi tahun sebelumnya dan target tahun berikutnya, dikarenakan masih adanya capaian realisasi yang melebihi/ kurang dari target
2. Menyusun setiap laporan lebih awal

3. Menyusun skema cascading eselon 2, 3 dan 4 dengan perbaikan indikator kinerja program/ kegiatan dengan skema cascading yang mendukung keselarasan perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan hingga sampai ke level individu
4. Membangun sistem dan penanggung jawab data dengan menggunakan aplikasi yang dilakukan berkala dan dimanfaatkan untuk dapat segera mengukur apaian kinerja BBPOM di Yogyakarta  
 Dokumen-dokumen pendukung dalam Siklus SAKIP dimulai sejak Perencanaan Kinerja (Perencanaan Kinerja, Perencanaan Kinerja Tahunan), Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Kinerja harus disusun secara akuntabel, terstruktur, selaras dan dilaporkan tepat waktu.  
 Untuk itu, perlu Indikator Kinerja Kegiatan pendukung dalam mencapai Sasaran Kegiatan ke-6 yaitu:

**Tabel 22. Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan ke-6**

SASARAN Kegiatan	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR (%)	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR
Terwujudnya RB BBPOM di Yogyakarta sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Yogyakarta	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	90,00%	93,19 %	103,54	Memuaskan
		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9 Dokumen	10 Dokumen	111,11	Memuaskan

Realisasi pemenuhan sarana prasarana sesuai standar pada tahun 2018 sebesar 93,19% dengan target 90,00% sehingga nilai capaian 103,54% (memuaskan). Sedangkan persen capaian terhadap target tahun 2019 (akhir periode Renstra) sebesar 90,50%.

Beberapa faktor yang mendukung tercapainya indikator kinerja pemenuhan sarana prasarana sesuai standar yaitu:

- Telah diterbitkannya Peraturan Kepala Badan POM RI nomor 20 Tahun 2015 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

- SK Kepala Badan POM No. HK.04.01.1.22.04.18.2167 Tahun 2018 tentang Standar Minimum Peralatan Laboratorium UPT di lingkungan Badan POM
- Menyelesaikan semua proses pengadaan alat laboratorium, alat pengolahan data dan meubelair tepat waktu.

Adapun kendala yang dihadapi antara lain :

- Belum dilakukan review terhadap standar sarana prasarana dan standar minimum alat laboratorium dikarenakan berkembangnya parameter uji sehingga diperlukan jumlah alat laboratorium yang lebih memadai (belum semua alat masuk di standar alat laboratorium)
- Pemenuhan ruangan pada standar Sarana dan Prasarana kantor terhambat dengan kondisi bangunan dan anggaran.

Capaian indikator kinerja pada komponen "Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu" dengan target 9 dokumen tercapai 10 dokumen. Meliputi :

1. Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2018 antara Kepala BBPOM di Yogyakarta dan Kepala Badan POM
2. Laporan Kinerja Tahun 2018
3. Laporan Tahunan (LAPTAH) Tahun 2018
4. Laporan Keuangan tahun 2017
5. Laporan Triwulan 1 Tahun 2018
6. Laporan Triwulan II Tahun 2018
7. Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2018
8. Laporan Triwulan III Tahun 2018
9. RKAKL/ DIPA tahun
10. Revisi Renstra Tahun 2015 - 2019

Tercapainya jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu dipengaruhi oleh komitmen pegawai dan pimpinan dalam mendapatkan data dan laporan yang harus disusun

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Akuntabilitas keuangan BBPOM di Yogyakarta Tahun 2018 telah dilaporkan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dengan realisasi sebesar 94,49%.

Dalam rangka pengawasan obat dan makanan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 jumlah anggaran BBPOM di Yogyakarta sebesar Rp. 38.942.072.000,-. Anggaran terakhir yang

dikelola sebesar Rp. 41.579.495.000,- karena adanya penambahan anggaran untuk pembayaran belanja listrik dan menambah kekurangan tunjangan kinerja. Realisasi anggaran untuk keenam sasaran kegiatan sebesar Rp. 39.288.045.351,- atau 94,49% sesuai di Tabel 23.

**Tabel 23. Realisasi Anggaran Enam Sasaran Kegiatan**

Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi Anggaran (Rp)	Persen Realisaasi	Nilai Capaian Sasaran Kegiatan
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Yogyakarta	2.385.592.000	2.243.077.279	94,03	101,07
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Yogyakarta	842.106.000	834.929.717	99,15	119,41%
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Yogyakarta	1.929.547.000	1.908.542.325	98,91	108,07%
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Yogyakarta	4.652.934.000	4.497.749.808	96,66	105,89%
Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Yogyakarta	903.374.000	843.706.831	93,40	107,00%
Terwujudnya RB Balai Besar POM di Yogyakarta sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015 - 2019	30.865.942.000	28.960.039.391	93,83	94,33%
<b>TOTAL</b>	<b>41.579.495.000</b>	<b>39.288.045.351</b>	<b>94,49</b>	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran terbesar untuk Sasaran Kegiatan Ke-6, karena mencakup belanja pegawai dan operasional perkantoran serta adanya pemenuhan standar minimal sarana prasarana dan alat-alat laboratorium. Dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kerjanya, perlu mengkaji lebih jauh faktor apa sajakah yang menyumbang sehingga efisiensi anggaran bisa ditingkatkan menjadi lebih baik.

**Tabel 24. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja (dalam ribuan)**

Jenis Belanja	Pagu			Realisasi			Persen Realisasi (%)		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Belanja Pegawai	8.404.411	8.082.629	8.440.079	7.821.367	7.722.051	7.880.096	93,06	95,54	93,37
belanja Barang	11.044.882	14.007.953	15.320.395	10.752.713	13.532.944	15.056.363	97,35	96,61	98,28
Belanja Modal	12.876.754	21.108.468	9.285.013	12.423.388	19.845.896	9.093.038	96,48	94,02	97,93
<b>TOTAL</b>	<b>32.326.047</b>	<b>43.199.050</b>	<b>41.579.495</b>	<b>30.997.468</b>	<b>41.100.891</b>	<b>39.288.045</b>	<b>95,89</b>	<b>95,14</b>	<b>94,49</b>

Realisasi anggaran tahun 2018 sebesar 94,49%, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan :

1. sisa pengadaan barang/ jasa
2. sisa belanja pegawai, lembur dan uang makan
3. adanya penambahan anggaran pembayaran tunjangan kinerja yang melebihi kebutuhan
4. sisa belanja barang dan perjalanan dinas
5. Perubahan alokasi anggaran dari semula anggaran Balai menjadi anggaran Pusat untuk kegiatan terpadu antara Pusat dan Balai.
6. Surat Edaran penggunaan dana PNBK yang terlambat tidak sesuai dengan jadwal dengan jumlah dana yang kurang proposional dengan anggaran yang dibutuhkan

Sedangkan upaya yang dilakukan BBPOM di Yogyakarta untuk memperbaiki/meningkatkan realisasi anggaran antara lain :

1. Proses pengadaan barang/ jasa dilaksanakan pada awal tahun
2. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal rencana yang ditetapkan
3. Pelaksanaan rapat progresif bulanan monev realisasi anggaran.
4. Mengoptimalkan sisa anggaran kegiatan atau pengadaan barang dan jasa dengan melakukan revisi DIPA atau POK

### C. ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

Pengukuran efisiensi adalah indikator input dan pencapaian output dari suatu sasaran/kegiatan. Kemampuan suatu kegiatan diukur menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/ lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/ lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/ lebih tinggi dari pada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika sebagai berikut:

**Jika  $IE \geq SE$ , maka kegiatan dianggap efisien**

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

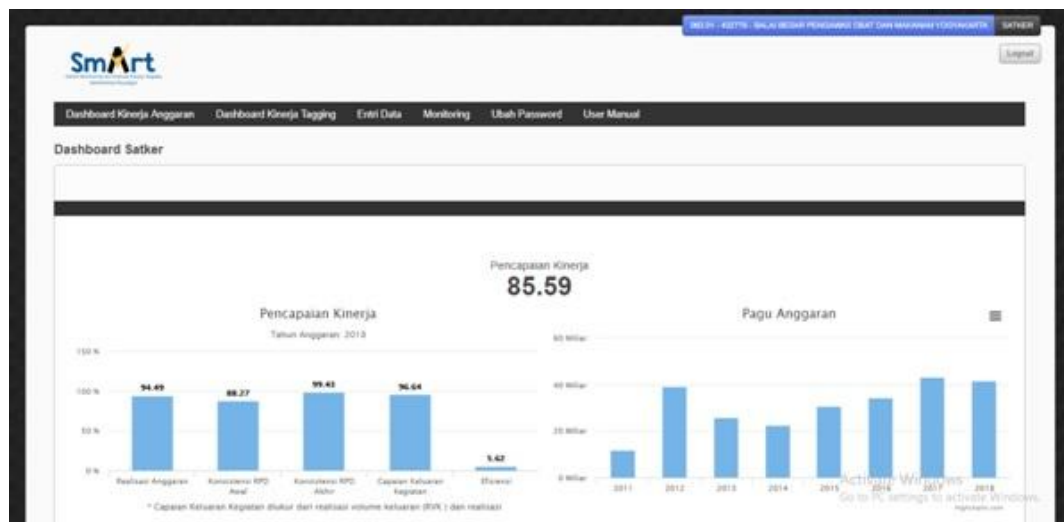
Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2018 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realiasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya. Profil tingkat efisiensi setiap Sasaran kegiatan ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel 25. Profil tingkat efisiensi Sasaran Kegiatan**

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		TE	KATEGORI
SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi DI. Yogyakarta	0,0632	Efisien
SK 2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	0,2547	Efisien
SK 3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	0,0121	Efisien
SK 4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	0,0247	Efisien
SK 5	Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan	-0,2982	Tidak Efisien
SK 6	Terwujudnya RB sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	0,0796	Efisien

Dari 6 (enam) sasaran, terdapat 1 (satu) sasaran yang realisasi kinerjanya lebih rendah daripada realisasi anggarannya. yaitu "Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan". Dikarenakan dari 8 kasus yang diperoleh, yang dilanjutkan ke dalam kriteria perkara hanya 6. Hal ini disebabkan BBPOM di Yogyakarta mengedepankan pembinaan terhadap sarana distribusi dan produksi sehingga ada kasus yang tidak dimajukan sebagai perkara. Diharapkan dengan adanya pembinaan, kesadaran dari pelaku usaha akan lebih meningkat daripada diberikan hukuman yang mungkin tidak memberikan efek jera.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, yang hanya berupa dana. Selanjutnya, perlu mempertimbangkan *input* yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Matriks Pengukuran Efisiensi Kegiatan pada Lampiran....



Gambar 26. Pencapaian Kinerja Berdasarkan Aplikasi SMART DJA Tahun 2018

Dilihat dari Monev SMART DJA di atas pada aplikasi [monev.anggaran.kemenkeu.go.id](http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id) BBPOM di Yogyakarta mendapatkan nilai Pencapaian Kinerja sebesar 85.59. Monitoring dan evaluasi dapat digunakan untuk menilai apakah suatu program atau kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana atau target, mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan pengukuran capaian kinerja output fisik kegiatan ini, diharapkan penanggungjawab kegiatan dapat menggunakannya sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

Perhitungan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 249/2011 bahwa Evaluasi Kinerja terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu : (1) implementasi, (2) manfaat, dan (3) evaluasi implementasi yang diukur menggunakan empat indikator, yaitu (a) penyerapan anggaran, (b) konsistensi perencanaan dan implementasi, (c) pencapaian output, dan (e) efisiensi.



# BAB IV

# PENUTUP



# PENUTUP

## A. KESIMPULAN

Pencapaian kinerja organisasi sesuai 6 sasaran kinerja yang telah dilaksanakan diukur menggunakan 15 Indikator Kinerja Utama (IKU), diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Sasaran kinerja "Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Yogyakarta", nilai Pencapaian Sasaran 101,07%, dengan kriteria memuaskan. Hal ini dapat terwujud dari 4 pencapaian indikator yang memuaskan yaitu persentase OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang memenuhi syarat dan 2 capaian indikator dengan nilai cukup yaitu Indek pengawasan obat dan makanan serta persentase obat yang memenuhi syarat.
2. Sasaran kinerja " Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Yogyakarta ", nilai Pencapaian Sasaran 119,41%, dengan kriteria memuaskan.
3. Sasaran kinerja " Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman wilayah kerja Balai Besar POM di Yogyakarta ", nilai Pencapaian Sasaran 108,07% dengan kriteria memuaskan
4. Sasaran kinerja "Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai Besar POM di Yogyakarta", nilai Pencapaian Sasaran 105,89% dengan kriteria memuaskan. Hal ini merupakan wujud dari 3 capaian indikator yang memuaskan yaitu persentase sarana distribusi obat yang MK, persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dan rasio tindak lanjut pengawasan obat dan makanan, 1 capaian indikator dengan nilai baik yaitu persentase pengujian sesuai standar dan 1 capaian indikator dengan nilai cukup yaitu persentase sarana produksi obat dan makana yang MK
5. Sasaran kinerja "Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Yogyakarta", nilai apaian sasaran 107,00% dengan kriteria memuaskan
6. Sasaran kinerja "Terwujudnya RB Balai Besar POM di Yogyakarta sesuai *roadmap* RB BPOM 2015 - 2019", nilai capaian sasaran 94,33% dengan kriteria cukup

Realisasi anggaran pada tahun 2018 berdasarkan sasaran kegiatan yang dilaksanakan diperoleh kesimpulan bahwa dari 6 (enam) sasaran kegiatan yang dilaksanakan terdapat 1 (satu)

sasaran kegiatan yang tidak efisien. Realisasi total anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 39.288.045.351,- (94,49%).

Keberhasilan yang dicapai tidak terlepas dari permasalahan dan kendala-kendala yang dijumpai, yaitu peredaran produk obat dan makanan yang sangat pesat baik dari segi jumlah maupun jenisnya, seiring dengan meningkatnya persaingan dalam perdagangan bebas dan kemajuan teknologi. Hal ini menuntut BBPOM di Yogyakarta untuk terus mengawal komoditi yang beredar dan meningkatkan pengawasan melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian dari segi pengetahuan, metode analisis dan peralatan serta baku pembanding. Pembinaan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kemandirian dalam menghadapi era globalisasi untuk menghasilkan produk yang terjamin mutu, keamanan dan kemanfaatan serta memiliki daya saing. Selain itu juga dilakukan edukasi kepada masyarakat melalui media cetak, televisi, radio dan media *online* sebagai upaya mengaktifasi cegah tangkal dalam penggunaan obat dan makanan yang lebih selektif. Serta yang tidak kalah penting adalah penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan dalam produksi maupun distribusi sehingga memberikan efek jera.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi publik dan pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari dukungan seluruh pegawai di Lingkungan BBPOM di Yogyakarta yang telah berkomitmen mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan baik dan benar.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja tahun 2018 perlu dirumuskan beberapa langkah sebagai strategi untuk mempertahankan capaian yang sudah memuaskan dan meningkatkan kinerja sehingga dapat mencapai target yang diharapkan, antara lain :

1. Langkah untuk mempertahankan capaian kinerja yaitu dengan :
  - Memelihara hubungan yang harmonis dengan lintas sektor
  - Selalu meningkatkan kapasitas laboratorium, sehingga dapat mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi dalam pengawasan obat dan makanan
  - Memelihara kompetensi petugas baik dalam komunikasi maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung pengawasan

2. Langkah untuk meningkatkan capaian kinerja dengan :
  - Mengintensifkan pembinaan kepada pelaku usaha dengan mengedepankan aspek persuasif sehingga pelaku usaha dengan penuh kesadaran melaksanakan GMP maupun GDP.
  - Melakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian kinerja, sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan dan solusi apabila terdapat kendala.
  - Peningkatan implementasi SAKIP di lingkungan BBPOM di Yogyakarta secara konsisten dan berkelanjutan.

# LAMPIRAN

**LAMPIRAN 1**  
**REVISI RENCANA STRATEGIS**

**LAMPIRAN 2**  
**PERJANJIAN KINERJA SOTK LAMA**

**LAMPIRAN 3**  
**PERJANJIAN KINERJA SOTK BARU**

**LAMPIRAN 4**  
**RENCANA KINERJA TAHUNAN AWALSOTK LAMA**

**LAMPIRAN 5**  
**RENCANA KINERJA TAHUNAN SOTK BARU**

**LAMPIRAN 6**  
**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA**

**LAMPIRAN 7**  
**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN**

**LAMPIRAN 8**  
**PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI**

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

### REVISI RENCANA STRATEGIS



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI BESAR POM di YOGYAKARTA**  
**NOMOR HK.01.02.95.09.18.8544**  
**TAHUN 2018**

**TENTANG**  
**REVISI RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR POM di YOGYAKARTA**  
**TAHUN 2015 – 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI BESAR POM DI YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa beberapa ketentuan dalam Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Nomor HK.06.02.96.04.15.3125 tanggal 20 April 2015 tentang Rencana Strategis Balai Besar POM di Yogyakarta Tahun 2015–2019, perlu disesuaikan dengan Struktur Organisasi Tata Kelola Balai Besar POM di Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta tentang Revisi Rencana Strategis Balai Besar POM di Yogyakarta Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pnjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 3.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);



**BADAN POM**

## **BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di YOGYAKARTA**

Jalan Tompeyan I, Tegaleja, Yogyakarta 55244

Telp. (0274) 561038, Telp./Fax. (0274) 519052 / ULPK Telp./Fax. (0274) 552250

e-mail : bpom\_yogyakarta@pom.go.id / bbpomjg@yahoo.co.id ; website : www.pom.go.id

4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (rtenstra K/L) 015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 860);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
9. Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

### **MEMUTUSKAN :**

1. Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI YOGYAKARTA TENTANG REVISI RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI YOGYAKARTA TAHUN 2015-2019**

**KESATU** : Mengesahkan Revisi Rencana Rencana Strategis Balai Besar POM di Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan oleh Keputusan ini;



**BADAN POM**

## BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di YOGYAKARTA

Jalan Tompeyan I, Tegaleja, Yogyakarta 55244

Telp. (0274) 561038, Telp./Fax. (0274) 519052 / ULPK Telp./Fax. (0274) 552250

e-mail : bpom\_yogyakarta@pom.go.id / bbpomjg@yahoo.co.id ; website : www.pom.go.id

- KEDUA** : Revisi Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama disajikan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Balai Besar POM di Yogyakarta dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- KETIGA** :
1. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penetapan Renstra sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini
  2. Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala
  3. Evaluasi pelaksanaan Renstra Balai Besar POM di Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir periode Rencana Strategis
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 14 September 2018

Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta

Dra. Sandra MP Linthin, Apt.M.Kes. g  
NIP. 19630407 198903 2 001

Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar POM di Yogyakarta  
Revisi Renstra Balai Besar POM di Yogyakarta 2018-2019

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Lokasi	Alokasi (dalam rupiah)
----	---------------------------	--------	------------------------

			2018	2019	2018	2019	Unit Organisasi Pelaksana	
Sasaran Kinerja Balai Besar POM di Yogyakarta								
1	<b>SK 1 . Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu</b>					<b>5.785.592.000</b>	<b>6.154.410.000</b>	BB POM di Yogyakarta
1.1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Yogyakarta	DIY	71,00	71,00				
1.2	Persentase Obat yang memenuhi Syarat	DIY	94,00	94,50				
1.3	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	DIY	72,00	65,00				
1.4	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	DIY	92,00	83,00				
1.5	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	DIY	96,00	97,00				
1.6	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	DIY	85,00	72,00				
2	<b>SK 2 Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan</b>					1.501.334.000	1.602.600.000	Balai POM Yogyakarta
2.1	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Yogyakarta	DIY	61	61				
2.2	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	DIY	-	66				
3	<b>SK 3 Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman</b>					1.605.546.000	1.233.104.000	Balai POM Yogyakarta
3.1	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	DIY	61	62				
4	<b>SK 4 Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko</b>					1.252.934.000	1.389.917.000	Balai POM Yogyakarta
4.1	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	DIY	24,00	30,00				
4.2	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	DIY	65,00	67,00				
4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	DIY	95,00	96,00				
4.5	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan	DIY	55,00	60,00				

5	<b>SK 5</b>	<b>Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan</b>				903.374.000	1.100.292.000	Balai POM Yogyakarta
	5.1	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	DIY	50,00	50,00			
6	<b>SK 6</b>	<b>Terwujudnya RB BB/BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019</b>				30.530.715.000	28.067.562.000	Balai POM Yogyakarta
	6.1	Nilai AKIP BB/BPOM	DIY	78,00	81,00			

## Lampiran 2

### PERJANJIAN KINERJA SOTK LAMA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
BALAI BESAR POM DI YOGYAKARTA  
NO: OR.03.95.01.18.0225**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt  
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P.  
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan - RI



Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P.  
NIP. 19631109 199003 2 001

Yogyakarta, 2 Januari 2018  
Pihak Pertama,  
Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta



Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt  
NIP. 19650113 199103 2 002



# BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di YOGYAKARTA

Jalan Tompeyan I, Tegalrejo, Yogyakarta 55244

Telp. (0274) 561038, Telp./Fax. (0274) 519052 / ULPK Telp./Fax. (0274) 552250

e-mail : bpom\_yogyakarta@pom.go.id / bbpomjg@yahoo.co.id ; website : www.pom.go.id

BADAN POM

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

### BALAI BESAR POM di YOGYAKARTA

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	<b>SS 1 Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan</b>	1.1 Persentase Obat yang memenuhi Syarat	93,50 %
		1.2 Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	55,56 %
		1.3 Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92,00 %
		1.4 Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	82,00 %
		1.5 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,60 %
	<b>SS 2 Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat</b>	2.1 Tingkat kepuasan masyarakat	73,72 %
		2.2 Jumlah Kabupaten/ Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan membenarkan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	5,00 Kota/ kabupaten
<b>SS 3 Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan</b>	3.1 Nilai SAKIP BBPOM di Yogyakarta dari Badan POM	78,00	
3165	<b>SP 1 Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan</b>		
	1.1 Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1.1.1 Sampel Makanan yang diuji dengan Parameter Kritis	1140 sampel
		1.1.2 Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diuji menggunakan Parameter Kritis	2660 sampel
	1.2 Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standard	1.2.1 Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	100 %
	1.3 Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standard	1.3.1 Persentase cakupan pemeriksaan sarana distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan	40 %
		1.3.2 Persentase Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian (Saryanfar)	35 %
	1.4 Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	1.4.1 Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	9 perkara
	<b>SP 2 Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat</b>		
	2.1 Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi, dan edukasi	2.1.1 Jumlah Layanan Publik BBPOM di Yogyakarta	1125 layanan
		2.1.2 Jumlah komunitas yang diberdayakan	39 komunitas
		2.1.3 Sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	98 Sekolah
	<b>SP 3 Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan</b>		
	3.1 Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	3.1.1 Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	79,66 %
	3.2 Penyusunan, Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	3.2.1 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9 Dokumen



**BADAN POM**

## BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di YOGYAKARTA

Jalan Tompeyan I, Tegalrejo, Yogyakarta 55244

Telp. (0274) 561038, Telp./Fax. (0274) 519052 / ULPK Telp./Fax. (0274) 552250

e-mail : bpom\_yogyakarta@pom.go.id / bbpomjg@yahoo.co.id ; website : www.pom.go.id

### Anggaran Kegiatan:

Indikator Kinerja		Anggaran
1.1.1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	Rp. 5.785.592.000
1.1.2	Pemenuhan target sampling produk Obat di Sektor publik (IFK)	Rp. -
1.2.1	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	Rp. 251.000.000
1.3.1	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	Rp. 1.001.934.000
1.4.1	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	Rp. 903.374.000
2.1.1	Jumlah Layanan Publik BBPOM di Yogyakarta	Rp. 842.106.000
2.1.2	Jumlah komunitas yang diberdayakan	Rp. 1.929.547.000
3.1.1	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	Rp. 9.804.013.000
3.2.1	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Rp. 18.424.506.000
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 38.942.072.000</b>

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan



DR. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P.  
NIP. 19631109 199003 2 001

Yogyakarta,  
Pihak Pertama,  
Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta



Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt  
NIP. 19660113 199103 2 002

LAMPIRAN 3

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sarana/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2018	Target				Ket.
				03	06	09	12	
3165	SP 1 Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan							
1.1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1.1.1 Sampel Makanan yang diuji dengan Parameter Kritis 1.1.2 Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diuji menggunakan Parameter Kritis	1140 sampel 2000 sampel	114	456	855	1140	
1.2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	1.2.1 Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	100 %	27,00	54,00	80,00	100,00	
1.3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	1.3.1 Persentase cakupan pemantauan sarana distributor Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan 1.3.2 Persentase Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian (Sayanfar)	40 % 35 %	10,00 10,00	23,00 25,00	32,00 30,00	40,00 40,00	
1.4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyelidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	1.4.1 Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	9 perkara	0	3	6	9	
SP 2 Meningkatkan Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat								
2.1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi, dan edukasi komunitas	2.1.1 Jumlah Layanan Publik BBPOM di Yogyakarta 2.1.2 Jumlah komunitas yang dibudayakan 2.1.3 Sekolah yang diterivensi koamanan Pangan Jenanan Anak Sekolah (PJAS)	1125 byanan 35 komunitas 98 Sekolah	243	486	729	1125	
SP 3 Meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Yogyakarta								
3.1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	3.1.1 Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	78,66 %	78,09	78,09	78,09	78,66	
3.2	Penyusunan, Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi yang diperlukan tepat waktu	3.2.1 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9 Dokumen	5	7	8	9	



## PERJANJIAN KINERJA SOTK BARU



### BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di YOGYAKARTA

Jalan Tompeyan I, Tegaltrejo, Yogyakarta 55244

Telp. (0274) 541038, Telp./Fax. (0274) 519052 / ULPK Telp./Fax. (0274) 552250

e-mail : bpom\_yogyakarta@pom.go.id / bbpomjg@yahoo.co.id ; website : www.pom.go.id

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Rustyawati, Apt.M.Kes.Epid.  
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta  
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P.  
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

(Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P.)

Yogyakarta, 28 September 2018

Pihak Pertama

(Dra. Rustyawati, Apt.M.Kes.Epid.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

**BALAI BESAR POM DI YOGYAKARTA**

NO	SASARAN KEGIATAN BALAI BESAR POM DI YOGYAKARTA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>RENJA 2018 (OTK Lama)</b>			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik, Suplemen Kesehatan yang diuji menggunakan parameter kritis	<b>2.660</b>
		Jumlah sampel Makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	<b>1.140</b>
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	<b>100%</b>
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan	<b>40%</b>
		Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan sarana Pelayanan Kefarmasian (Saryanfar)	<b>35%</b>
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	<b>10</b>
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	<b>90.00%</b>
6	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	<b>9</b>
7	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BB/BPOM	<b>1410</b>
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	<b>46</b>



BADAN POM

## BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di YOGYAKARTA

Jalan Tompeyan I, Tegalrejo, Yogyakarta 55244

Telp. (0274) 561038, Telp. /Fax. (0274) 519052 / LILPK Telp. /Fax. (0274) 552250

e-mail : bpom\_yogyakarta@pom.go.id / bbpomjg@yahoo.co.id ; website : www.pom.go.id

NO	SASARAN KEGIATAN BALAI BESAR POM DI YOGYAKARTA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>PETA STRATEGI (OTK Baru)</b>			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi DI. Yogyakarta	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	71,00
		Persentase Obat yang memenuhi Syarat di Provinsi DI. Yogyakarta	94,00
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi DI. Yogyakarta	72,00
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi DI. Yogyakarta	92,00
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi DI. Yogyakarta	96,00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi DI. Yogyakarta	85,00
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Yogyakarta	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	61,00
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di Wilayah Kerja BBPOM di Yogyakarta	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	61,00
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi DI. Yogyakarta	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi DI. Yogyakarta	100%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	24,00
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	65,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	95,00
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	55,00



**BADAN POM**

## BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di YOGYAKARTA

Jalan Tompeyan I, Tegaleja, Yogyakarta 55244

Telp. (0274) 561038, Telp./Fax. (0274) 519052 / ULPK Telp./Fax. (0274) 552250

e-mail : bpom\_yogyakarta@pom.go.id / bbpomjg@yahoo.co.id ; website : www.pom.go.id

NO	SASARAN KEGIATAN BALAI BESAR POM DI YOGYAKARTA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Yogyakarta	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	50,00
6	Terwujudnya RB BB/BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP Balai Besar POM di Yogyakarta	78,00

Kegiatan :	Anggaran :
Pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Yogyakarta	Rp. 41.579.495.000,-

Pihak Kedua

(Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P.)

Yogyakarta, 28 September 2018

Pihak Pertama

  
\* (Dra. Rustyawati, Apt.M.Kes.Epid.)



# BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di YOGYAKARTA

Jalan Tompeyan I, Tegalejo, Yogyakarta 55244

Telp. (0274) 561038, Telp./Fax. (0274) 519052 / ULPK Telp./Fax. (0274) 552250

e-mail : bpom\_yogyakarta@pom.go.id / bbpomj@yahoo.co.id ; website : www.pom.go.id

**BADAN POM**

## RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA BALAI BESAR POM DI YOGYAKARTA TAHUN 2018

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI			
			B3	B6	B9	B12*	B3	B6	B9	B12
1	SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi DI. Yogyakarta	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta				71,00				
		Persentase Obat yang memenuhi Syarat di Provinsi DI.Yogyakarta	93,50	93,50	94,00	94,00				
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi DI.Yogyakarta	70,50	71,00	71,50	72,00				
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi DI.Yogyakarta	92,00	92,00	92,00	92,00				
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi DI.Yogyakarta	94,50	95,00	95,50	96,00				
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi DI.Yogyakarta	75,00	80,00	83,00	85,00				
2	SK.2 Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Yogyakarta	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Yogyakarta				61,00				
		Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman di Balai Besar POM di Yogyakarta								
3	SK.3 Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di Wilayah Kerja BBPOM di Yogyakarta	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta				61,00				
		SK.4 Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi DI. Yogyakarta	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi DI. Yogyakarta	100	100	100	100,00			
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta		3,00	5,00	13,00	24,00				
	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta		19,00	36,00	50,00	65,00				
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta		94,00	94,33	94,66	95,00				
SK.5 Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Yogyakarta	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	5,00	29,00	42,00	55,00					
	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	20,00	30,00	40,00	50,00					
4	SK.6 Terwujudnya RB BB/BBPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP Balai Besar POM di Yogyakarta				70,00				

\*) diukur pada akhir tahun

Pihak Kedua

(Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P.)

Yogyakarta, 28 September 2018

Pihak Pertama

(Dra. Rustyawati, Apt.M. Kes, Eptid.)

### LAMPIRAN 4

### RENCANA KINERJA TAHUNAN AWAL SOTK LAMA

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI YOGYAKARTA**  
**NOMOR: HK.07.95.06.17.4974**

**TENTANG**  
**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BALAI BESAR POM DI YOGYAKARTA TAHUN 2018**

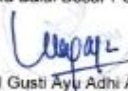
**KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI YOGYAKARTA**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018 pada Balai Besar POM di Yogyakarta
- Mengingat** :
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
  4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.21.3546 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KB POM Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM
  7. Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Nomor HK.06.02.96.04.15.3125 tentang Rencana Strategis Balai Besar POM di Yogyakarta Tahun 2015-2019;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar POM di Yogyakarta Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA** : Setiap akhir tahun anggaran, Balai Besar POM di Yogyakarta melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- KETIGA** : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu acuan untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar POM di Yogyakarta
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Desember 2018 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal: 13 Juni 2017  
Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta



Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt  
NIP. 19660113 199103 2 002

- Tembusan** :
1. Sekretaris Utama Badan POM RI
  2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM RI
  3. Inspektorat Badan POM RI

Lampiran RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018 BALAI BESAR POM DI YOGYAKARTA NO: HK. 07.95.06.17.4974

## RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	SP 1 Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1.1 Persentase Obat yang memenuhi Syarat	93,50 %
		1.2 Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	55,56 %
		1.3 Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92,00 %
		1.4 Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	82,00 %
		1.5 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,60 %
	SP 2 Meningkatkan Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat	2.1 Tingkat kepuasan masyarakat	73,72 %
2.2 Jumlah Kabupaten/ Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan		5 Kota/ kabupaten	
SP 3 Meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Yogyakarta	3.1 Nilai SAKIP BBPOM di Yogyakarta dari Badan POM	A	
3165	SP 1 Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan		
	1.1 Meningkatkan kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1.1.1 Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3800 sampel
		1.1.2 Pemenuhan target sampling produk Obat di Sektor publik (IFK)	100 %
	1.2 Meningkatkan kualitas sarana produksi yang memenuhi standard	1.2.1 Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	100 %
	1.3 Meningkatkan kualitas sarana distribusi yang memenuhi standard	1.3.1 Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	40 %
	1.4 Meningkatkan hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	1.4.1 Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	9 perkara
	SP 2 Meningkatkan Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat		
	2.1 Meningkatkan kerjasama, komunikasi, informasi, dan edukasi	2.1.1 Jumlah Layanan Publik BBPOM di Yogyakarta	1125 layanan
		2.1.2 Jumlah komunitas yang diberdayakan	39 komunitas
	SP 3 Meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Yogyakarta		
	3.1 Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	3.1.1 Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	79,66 %
	3.2 Penyusunan, Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	3.2.1 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9 Dokumen

Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta

Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt  
NIP. 19680113 199103 2 002

### LAMPIRAN 5

### RENCANA KINERJA TAHUNAN SOTK BARU

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI YOGYAKARTA  
NOMOR : HK.06.02.105.09.18.08779.b**

**TENTANG  
RENCANA KINERJA BALAI BESAR POM DI YOGYAKARTA  
TAHUN 2018**

**Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan pendanaan pemerintah serta sebagai tindak lanjut Keputusan Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Nomor HK.06.02.105.09.18.8544 Tahun 2018 tentang Revisi Rencana Strategis Balai Besar POM di Yogyakarta Tahun 2015-2019, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar POM di Yogyakarta Tahun 2018;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta tentang Rencana Kinerja Balai Besar POM di Yogyakarta Tahun 2018.
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);



## BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di YOGYAKARTA

Jalan Tompeyan I, Tegalrejo, Yogyakarta 55244

Telp. (0274) 561038, Telp./Fax. (0274) 519052 / ULPK Telp./Fax. (0274) 552250


e-mail : bpom\_yogyakarta@pom.go.id / bbpomjg@yahoo.co.id ; website : www.pom.go.id

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745).

### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Tentang Rencana Kinerja Balai Besar POM di Yogyakarta tahun 2018.
- Pertama : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Balai Besar POM di Yogyakarta Tahun 2018;
- Kedua : Keputusan Balai Besar POM di Yogyakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 24 September 2018  
Balai Besar POM di Yogyakarta

  
Dra. Rustyawati, Apt.M.Kes.Epid.  
NIP. 19660909 199303 2 002



## BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di YOGYAKARTA

Jalan Tompeyan I, Tegalejo, Yogyakarta 55244

Telp. (0274) 561038, Telp./Fax. (0274) 519052 / ULPK Telp./Fax. (0274) 552250

e-mail : bpom\_yogyakarta@pom.go.id / bbpomjg@yahoo.co.id ; website : www.pom.go.id

Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta  
Nomor : HK. 06.02.105.09.18.8779.b  
Tentang Rencana Kinerja Balai Besar POM di Yogyakarta Tahun 2018

### RENCANA KINERJA BALAI BESAR POM DI YOGYAKARTA TAHUN 2018

NO	SASARAN KEGIATAN BALAI BESAR POM DI YOGYAKARTA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>RENJA 2018 (OTK Lama)</b>			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik, Suplemen Kesehatan yang diuji menggunakan parameter kritis	<b>2.660</b>
		Jumlah sampel Makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	<b>1.140</b>
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	<b>100%</b>
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan	<b>40%</b>
		Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan sarana Pelayanan Kefarmasian (Saryanfar)	<b>35%</b>
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	<b>10</b>
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	<b>90.00%</b>
6	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	<b>9</b>
7	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BB/BPOM	<b>1410</b>
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	<b>46</b>



# BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di YOGYAKARTA

Jalan Tompeyan I, Tegalejo, Yogyakarta 55244

Telp. (0274) 561038, Telp./Fax. (0274) 519052 / ULPK Telp./Fax. (0274) 552250

e-mail : bpom\_yogyakarta@pom.go.id / bbpomjg@yahoo.co.id ; website : www.pom.go.id

Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta  
 Nomor : HK. 06.02.105.09.18.8779.b  
 Tentang Rencana Kinerja Balai Besar POM di Yogyakarta Tahun 2018

## RENCANA KINERJA BALAI BESAR POM DI YOGYAKARTA TAHUN 2018

NO	PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN BALAI BESAR POM DI YOGYAKARTA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>PETA STRATEGI (OTK Baru)</b>				
1	Stakeholder	SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi DI.Yogyakarta	Indeks POM di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	71,00
			Persentase Obat yang memenuhi Syarat di Provinsi DI.Yogyakarta	94,00
			Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi DI.Yogyakarta	72,00
			Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi DI.Yogyakarta	92,00
			Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi DI.Yogyakarta	96,00
			Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi DI.Yogyakarta	85,00
2	Customer	SK.2 Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Yogyakarta	61,00
			Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	-
3	Internal Process	SK.3 Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	61,00
			SK.4 Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi DI.Yogyakarta	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi DI.Yogyakarta
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta		24,00
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta		65,00
		SK.5 Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	95,00
Ratio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	55,00			
			Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	50,00



## BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di YOGYAKARTA

Jalan Tompeyan I, Tegalejo, Yogyakarta 55244

Telp. (0274) 561038, Telp./Fax. (0274) 519052 / ULPK Telp./Fax. (0274) 552250

e-mail : bpom\_yogyakarta@pom.go.id / bbpomjg@yahoo.co.id ; website : www.pom.go.id

NO	PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN BALAI BESAR POM DI YOGYAKARTA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4	<i>Learning &amp; Growth</i>	SK.6 Terwujudnya RB BB/BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP Balai Besar POM di Yogyakarta	78,00

Kepala Balai Besar POM di  
Yogyakarta



Dra. Rustyawati, Apt.M.Kes.Epid.  
NIP. 19660909-199303 2 002

**LAMPIRAN 6**

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA  
BALAI BESAR POM DI YOGYAKARTA  
TAHUN 2018**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI			
			B3	B6	B9	B12*	B3	B6	B9	B12
SK.1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi DI. Yogyakarta	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta				71,00				71,00
		Persentase Obat yang memenuhi Syarat di Provinsi DI.Yogyakarta	93,50	93,50	94,00	94,00	98,91	94,95	92,62	91,67
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi DI.Yogyakarta	70,50	71,00	71,50	72,00	82,14	74,63	75,95	73,21
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi DI.Yogyakarta	92,00	92,00	92,00	92,00	92,54	91,87	92,61	92,35
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi DI.Yogyakarta	94,50	95,00	95,50	96,00	97,18	97,67	97,30	96,50
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi DI.Yogyakarta	75,00	80,00	83,00	85,00	91,18	90,32	87,86	88,48
SK.2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Yogyakarta	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Yogyakarta				61,00				72,00
		Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman di Balai Besar POM di Yogyakarta				-				
SK.3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di Wilayah Kerja BBPOM di Yogyakarta	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta				61,00				65,92



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI			
			B3	B6	B9	B12*	B3	B6	B9	B12
SK.4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi DI. Yogyakarta	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi DI. Yogyakarta	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	3,00	5,00	13,00	24,00	15,52	15,96	19,47	23,32
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	19,00	36,00	50,00	65,00	69,51	70,00	77,31	78,85
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	94,00	94,33	94,66	95,00	100	100	97,56	98,02
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	5,00	29,00	42,00	55,00	37,96	49,4	57,3	59,29
SK.5	Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Yogyakarta	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	20,00	30,00	40,00	50,00				53,85
SK.6	Terwujudnya RB BB/BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP Balai Besar POM di Yogyakarta				78,00				73,58



## LAMPIRAN 7

### PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	Realisasi	% CAPAIAN TARGET
MENGUATNYA SISTEM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Program Pengawasan Obat dan Makanan		43.199.050.000	41.251.590.033	95,49
SK 1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi DI. Yogyakarta	Pengujian sampel makanan dengan parameter kritis	<u>Input</u> : Dana <u>Output</u> : Jumlah sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis	Rp. 806.544.000 Sampel 1140	Rp. 761.078.133 Sampel 1.140	94,36 100,00
	Pengujian sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan dengan parameter kritis	<u>Input</u> : Dana <u>Output</u> : Jumlah sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	Rp. 1.579.048.000 Sampel 2660	Rp. 1.481.999.146 Sampel 2.663	93,85 100,11
SK 2 Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	Pemberian layanan publik BB/BPOM	<u>Input</u> : Dana <u>Output</u> : Jumlah Layanan Publik	Rp. 842.106.000 Layanan 1410	Rp. 834.929.717 Layanan 1.754	99,15 124,40
SK 3 Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Komunitas yang diberdayakan	<u>Input</u> : Dana <u>Output</u> : Jumlah Komunitas yang diberdayakan	Rp. 1.270.319.000 Komunitas 46	Rp. 1.259.271.575 Komunitas 46	99,13 100,00
	Sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah	<u>Input</u> : Dana <u>Output</u> : Jumlah Sekolah yang diintervensi keamanan PJAS	Rp. 659.228.000 Sekolah 98	Rp. 649.270.750 Sekolah 98	98,49 100,00



SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	Realisasi		% CAPAIAN TARGET
SK 4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	Pengawasan sarana produksi obat dan makanan	<u>Input</u> : Dana	Rp. 251.000.000	Rp.	247.106.100	98,45
			<u>Output</u> : Jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diawasi	Sarana 283	Sarana	283	100,00
		Pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan	<u>Input</u> : Dana	Rp. 605.476.000	Rp.	591.984.875	97,77
			<u>Output</u> : Jumlah sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan yang diawasi	Sarana 468	Sarana	470	100,43
Penyusunan dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan	<u>Input</u> : Dana	Rp. 3.400.000.000	Rp.	3.265.333.283	96,04		
	<u>Output</u> : Jumlah dokumen manajemen laboratorium	dokumen 16	dokumen	16	100,00		
Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian	<u>Input</u> : Dana	Rp. 396.458.000	Rp.	393.325.550	99,21		
	<u>Output</u> : Jumlah sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang diawasi	Sarana 310	Sarana	312	100,65		
SK 5	Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan	Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	<u>Input</u> : Dana	Rp. 744061000	Rp.	693.079.750	93,15
			<u>Output</u> : Jumlah perkara	Perkara 10	Perkara	6	60,00
		Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan yang ditangani	<u>Input</u> : Dana	Rp. 159.313.000	Rp.	150.627.081	94,55
<u>Output</u> : Jumlah Laporan penyidikan	Laporan 3		Laporan	3	100,00		
SK 6	Terwujudnya RB sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan keuangan yang dilaporkan tepat waktu	<u>Input</u> : Dana	Rp. 1.335.742.000	Rp.	1.313.239.177	98,32
			<u>Output</u> : Jumlah Dokumen yang dilaporkan tepat waktu	dokumen 9	dokumen	10	111,11
		Pengadaan sarana prasarana dan penunjang kerja	<u>Input</u> : Dana	Rp. 21.123.363.000	Rp.	19.406.381.356	91,87
			<u>Output</u> : Jumlah Sarana	Sarana 1	Sarana	1	100,00
		Pengadaan Pemenuhan alat laboratorium	<u>Input</u> : Dana	Rp. 8.406.837.000	Rp.	8.240.418.858	98,02
<u>Output</u> : Jumlah Alat Laboratorium	Unit 54		Unit	54	100,00		

## LAMPIRAN 8

### PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	Rata-rata % capaian target indikator		IE	SE	Kategori	TE	
		Input	Output					
MENGUATNYA SISTEM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Program Pengawasan Obat dan Makanan							
SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi DI. Yogyakarta	Pengujian sampel makanan dengan parameter kritis	94	100	1,05974	1	Efisien	0,0597
		Pengujian sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan dengan parameter kritis	94	100	1,06669	1	Efisien	0,0667
SK 2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	Pemberian layanan publik BB/BPOM	99	124	1,25466	1	Efisien	0,2547
SK 3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Komunitas yang diberdayakan	99	100	1,00877	1	Efisien	0,0088
		Sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah	98	100	1,01534	1	Efisien	0,0153
SK 4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	Pengawasan sarana produksi obat dan makanan	98	100	1,01576	1	Efisien	0,0158
		Pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan	98	100	1,02716	1	Efisien	0,0272
		Penyusunan dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan	96	100	1,04124	1	Efisien	0,0412
		Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian	99	101	1,01447	1	Efisien	0,0145
SK 5	Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan	Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	93	60	0,64413	1	Tidak Efisien	-
		Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan yang ditangani	95	100	1,05767	1	Efisien	0,0577
SK 6	Terwujudnya RB sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan keuangan yang dilaporkan tepat waktu	98	111	1,13015	1	Efisien	0,1302
		Pengadaan sarana prasarana dan penunjang kerja	92	100	1,08848	1	Efisien	0,0885
		Pengadaan Pemenuhan alat laboratorium	98	100	1,02020	1	Efisien	0,0202

---

## Daftar Lampiran

Lampiran 1	Revisi Rencana Strategis
Lampiran 2	Perjanjian Kinerja SOTK Lama
Lampiran 3	Pengukuran Kinerja SOTK Baru
Lampiran 4	Rencana Kinerja Tahunan awal SOTK Lama
Lampiran 5	Rencana Kinerja Tahunan awal SOTK Baru
Lampiran 6	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Yogyakarta Tahun 2018
Lampiran 7	Pengukuran Kinerja Kegiatan
Lampiran 8	Pengukuran Tingkat Efisiensi

## Daftar Gambar

- Gambar 1 Jumlah karyawan berdasarkan pendidikan
- Gambar 2 Wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta
- Gambar 3 Sarana produksi Obat dan Makanan dan sarana distribusi obat yang diawasi di propinsi DIY
- Gambar 4 Struktur Organisasi BBPOM di Yogyakarta
- Gambar 5 Profil Pencapaian Indikator Kinerja Utama
- Gambar 6 Profil obat TMS
- Gambar 7 Profil Obat Tradisional TMS
- Gambar 8 Profil Hasil Pengujian Obat Tradisional TMS Mutu secara Kimia dan Mikro
- Gambar 9 Profil Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat (2015-2018)
- Gambar 10 Profil Hasil Pengujian Kosmetika
- Gambar 11 Profil Hasil Pengujian Suplemen kesehatan
- Gambar 12 Profil Hasil Pengujian Makanan
- Gambar 13 Profil parameter uji makanan TMS secara kimia
- Gambar 14 Profil Layanan Publik Tahun 2015-2018
- Gambar 15 Persentase sampel TMS thn 2013 – 2018
- Gambar 16 Indeks pengetahuan masyarakat per komoditi
- Gambar 17 Realisasi jumlah sampel perkomoditi
- Gambar 18 Profil sarana produksi yang memenuhi ketentuan
- Gambar 19 Hasil Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan Tahun 2016-2018
- Gambar 20 Peningkatan hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan MK
- Gambar 21 Profil hasil pemeriksaan pada sarana distribusi Obat
- Gambar 22 Tindak lanjut pengawasan di BBPOM Yogyakarta
- Gambar 23 Profil Perkara Tahun 2015-2018
- Gambar 24 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Tahun 2016, 2017 dan 2018
- Gambar 25 Perbandingan Nilai Evaluasi SAKIP
- Gambar 26 Pencapaian Kinerja Berdasarkan Aplikasi SMART DJATahun 2018

## Daftar Tabel

Tabel 1	Perjanjian Kinerja Tahun 2018 (SOTK lama)
Tabel 2	Perjanjian Kinerja Tahun 2018 (SOTK baru)
Tabel 3	Pencapaian Sasaran Kegiatan
Tabel 4	Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-1
Tabel 5	Pencapaian Indikator Kinerja ke 1 pada Sasaran Kegiatan ke-1
Tabel 6	Pencapaian Indikator Kinerja ke 2 pada Sasaran Kegiatan ke- 1
Tabel 7	Pencapaian Indikator Kinerja ke 3 pada Sasaran Kegiatan ke- 1
Tabel 8	Pencapaian Indikator Kinerja ke 4 pada Sasaran Kegiatan ke-1
Tabel 9	Pencapaian Indikator Kinerja ke 5 pada Sasaran Kegiatan ke-1
Tabel 10	Pencapaian Indikator Kinerja ke 6 pada Sasaran Kegiatan ke-1
Tabel 11	Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-2
Tabel 12	Alokasi Anggaran Pelaksanaan Pengawasan Obat & Makanan Kab/Kota 2018
Tabel 13	Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-3
Tabel 14	Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-4
Tabel 15	Pencapaian Indikator Kinerja ke 1 pada Sasaran Kegiatan ke-4
Tabel 16	Pencapaian Indikator Kinerja ke 2 pada Sasaran Kegiatan ke-4
Tabel 17	Pencapaian Indikator Kinerja ke 3 pada Sasaran Kegiatan ke-4
Tabel 18	Pencapaian Indikator Kinerja ke 4 pada Sasaran Kegiatan ke-4
Tabel 19	Pencapaian Indikator Kinerja ke 5 pada Sasaran Kinerja ke-4
Tabel 20	Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-5
Tabel 21	Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-6
Tabel 22	Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan ke-6
Tabel 23	Realisasi Anggaran Enam Sasaran Kegiatan
Tabel 24	Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja (dalam ribuan)
Tabel 25	Profil tingkat efisiensi Sasaran Kegiatan



# BALAI BESAR POM di YOGYAKARTA